



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN SEKJEN, IRJEN, KEPALA BPSDM DAN PMD DTT, DAN
KEPALA BPID DTT KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : RDP
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 5 September 2022
Waktu : Pukul 10.45 s.d. 13.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si. (F-P. GERINDRA) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai bulan Agustus 2022
2. Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2023
3. Membahas usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
42 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
9 dari 11 orang Anggota
1. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
2. Mochamad Herviano
3. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.
4. Sukur H. Nababan, S.T.
5. Ir. Sudjadi
6. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
7. H. Irmadi Lubis
8. Ir. Effendi Sianipar
9. Harvey B. Malaihollo
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
6 dari 8 orang Anggota
1. Drs. Hamka B Kady, M.S.

2. Cen Sui Lan
 3. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
 4. Ilham Pangestu
 5. Muhammad Fauzi, S.E.
 6. Ir. H. Anang Susanto, M.Si.
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
6 dari 7 orang Anggota
1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
 2. Ir. Sumail Abdullah
 3. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
 4. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
 5. Drs. H. Mulyadi, M.MA.
 6. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
4 dari 6 orang Anggota
1. Drs. H. Tamanuri, M.M.
 2. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
 3. Drs. H. Soehartono, M.Si.
 4. Drs. Fadholi, M. Ikom.
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
5 dari 6 orang Anggota
1. H. Ruslan M. Daud
 2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
 3. Sofyan Ali, S.H.
 4. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
 5. H. Syafiuddin, S.Sos.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
5 dari 5 orang Anggota
1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
 2. Willem Wandik
 3. drh. Jhonni Allen Marbun, M.M.
 4. Lasmi Indaryani, S.E.
 5. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
3 dari 5 orang Anggota
1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
 2. Ir. H. Sigit Sosiantomo
 3. KH. Toriq Hidayat, Lc.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)

3 dari 5 orang Anggota

1. Athari Ghauthi Ardi
2. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
3. Mesakh Mirin, SKM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI (Taufik Madjid, S.Sos., M.Si.)
2. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI (Ir. Eko Sri Haryanto, MM.)
3. Kepala BPSDM dan PMD DTT Kementerian Desa PDT, dan, Transmigrasi RI (Dr. Luthfiah. Nurlaela, M.Pd.)
4. Kepala BPID DTT Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI (Dr. Ivanovich Agusta, SP, M.Si.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT / F-P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.)

Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekjen, Dirjen, Kepala BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, hari Senin 5 September 2022 Pukul 10.45 sampai dengan selesai.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia beserta jajarannya,
Serta hadirin yang kami hormati,**

Mengawali rapat hari ini marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita

semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat walafiat baik secara fisik maupun secara virtual dari tempat masing-masing.

Menurut laporan dari Sekretariat, saat ini rapat Komisi V DPR RI telah ditandatangani dan dihadiri oleh 33 orang yang hadir secara fisik 13 dan virtual 20 orang, dari 55 Anggota dan terdiri dari lebih *sepuluh*, separuh unsur fraksi sehingga telah memenuhi kuorum. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkanlah kami membuka Rapat Dengar Pendapat pada hari ini dan sesuai Ketentuan Pasal 276 ayat (1), Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI, pada hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.45 WIB)

Kami ucapkan terima kasih kepada Sekjen, Irjen, dan Kepala, dan para Kepala Badan Kementerian Desa, PDTT, beserta jajarannya yang telah memenuhi undangan kami dalam rapat dengar pendapat pada hari ini dengan agenda membahas dan mengevaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 sampai bulan Agustus 2022. Alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I mitra kerja Komisi V DPR RI dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan usulan-usulan program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi.

Pimpinan, Anggota Komisi V DPR RI, dan Para pejabat Eselon I Kementerian Desa PDTT yang kami hormati,

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa PDTT pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, telah disepakati beberapa hal di antaranya Pagu Nota Keuangan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 Kementerian Desa, PDTT, dan Transmigrasi, maaf PDT dan Transmigrasi adalah sebesar Rp2,99 Triliun. Dari alokasi anggaran tersebut untuk Sekretariat Jenderal adalah sebesar Rp225 Miliar yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan antara lain: layanan dukungan manajemen, perencanaan, dan kerja sama, rekrutmen dan pengangkatan pegawai dan operasional dan pemeliharaan kantor, sementara Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal dalam APBN Tahun Anggaran 2022 per Agustus 2022 adalah sebesar 56,68%.

Selanjutnya, Inspektorat Jenderal mendapatkan anggaran sebesar Rp51,75 Miliar, yang akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan antara lain: pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, analisa dan pemantauan hasil pengawasan dan pelayanan pendidikan dan pelatihan, sementara Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal dalam APBN Tahun Anggaran 2022 per Agustus 2022 adalah sebesar 50,06%.

Untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memperoleh anggaran sebesar Rp1,79 Triliun yang akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan di antaranya, Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi, Pelatihan Sumber Daya Manusia Daerah, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Pelatihan ASN. Sementara, Realisasi Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam APBN Tahun Anggaran 2022 per Agustus 2022 adalah sebesar 53,86%.

Selanjutnya, anggaran Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp134,78 Miliar yang akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan antara lain: dukungan manajemen, pengembangan kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dan rencana keterpaduan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Sementara, realisasi antara Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam APBN Tahun Anggaran 2022 per Agustus 2022 adalah sebesar 51,56%.

Sejalan dengan itu, dalam kesempatan ini kami tegaskan kembali agar dalam proses penyusunan Pagu ini, agar tiap-tiap unit organisasi Eselon I benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan dari Komisi V DPR RI. Selanjutnya, terdapat sejumlah permasalahan strategis yang perlu mendapat perhatian dari Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM, dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi antara lain:

1. Perlu adanya peningkatan koordinasi baik secara internal maupun eksternal, agar terwujud pola kerja yang lebih efektif dan efisien;
2. Perlu meningkatkan pengawasan internal dalam rangka meminimalisir temuan dan permasalahan dalam penggunaan anggaran;
3. Perlunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, dalam rangka pengembangan ketahanan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Perlunya pengolahan data dan informasi desa yang terpadu dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

**Para Anggota Komisi V DPR RI, dan
Para pejabat Eselon I Kementerian Desa PDTT, yang kami hormati,**

Demikian, pengantar dari kami selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Sekjen, Irjen dan para Kepala Badan Kementerian Desa PDTT untuk dapat menyampaikan penjelasannya, kami persilakan untuk yang pertama diawali oleh Pak Sekjen. Silakan, Pak Sekjen.

SEKJEN KEMENDES PDTT RI (TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si.):

Baik terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam damai sejahtera untuk kita semua,
Shalom,*

*Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,*

**Pimpinan Komisi V yang kami hormati,
Anggota Komisi V yang kami hormati,
Semuanya yang kami muliakan,**

Pertama kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, hari ini kami Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi akan mengawali memaparkan untuk rencana program dan usulan mitra Komisi V ke Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Kemudian, akan dilanjutkan oleh Inspektur Jenderal dalam hal ini akan disampaikan oleh Plt. Inspektur Jenderal, Pak Eko Sri Haryanto, kemudian Kepala BPSDM, Ibu Profesor Luthiyah Nurlaela, dan kemudian yang terakhir Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, PDT, dan Transmigrasi Bapak Ivanovic Agusta. Mohon izin kami mulai dari Sekretariat Jenderal.

Paparan kami paling tidak ada empat pokok bahasan yang kami akan melaporkan. Yang pertama evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022. Yang kedua alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing di unit Eselon II yang ada di sekretariat jenderal. Kemudian yang ketiga, usulan penyesuaian alokasi program dan anggaran dalam RAPBN 2023 dengan memperhatikan masukkan mitra Komisi V DPR RI. Kemudian, yang terakhir usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.

Yang pertama, evaluasi pelaksanaan anggaran di Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022. Realisasi menurut jenis belanja, kami laporkan untuk belanja pegawai, realisasi sampai dengan saat ini 62% atau Rp32.679.749.727, sisa anggaran Rp19.664.770.273. Untuk jenis belanja barang dari Pagu Rp163.211.622.000 realisasi Rp89.529.038.729 atau 54,85%. Sisa Rp73.682.583.271. Untuk jenis belanja modal Pagu Rp4.645.889.000, realisasi Rp2.571.584.126 atau 55,35%, sisa anggaran Rp2.074.304.874. Total, Pagu untuk 2022 Rp220.202.031.000, realisasi Rp124.780.372.582 atau 56,68%. Sisa total di Sekretariat Jenderal adalah Rp95.421.658.418, *ribu*.

Bila kita lihat pada rencana penarikan dana untuk sampai dengan bulan Agustus ini, bila dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2021 paling tidak hampir sama untuk bulan Agustus. Sedangkan, September 2021, 61,32% dan di awal September ini realisasi 56,68%, masih cukup waktu untuk kita bisa sama dengan Realisasi Tahun 2021. Sedangkan, untuk 2022 ini sendiri deviasi kurang lebih 3%, mestinya rencana penarikan dana 59,55% sedangkan capaian realisasi baru di angka 56,68%. Kami berupaya untuk terus bisa menyesuaikan dengan rencana penarikan dana.

Untuk bahasan yang kedua, alokasi anggaran menurut fungsi dan program di masing-masing unit kerja utamanya di Sekretariat Jenderal, kami laporkan. Untuk biro hukum belanja non operasional 6,5 Miliar, Biro Humas,

mohon izin, untuk 2023, untuk Biro Humas belanja non operasional 13 Miliar. Biro Perencanaan dan Kerja Sama, belanja non operasional 9 Miliar ditambah pinjaman luar negeri 15 Miliar total 24 Miliar. Biro Kepegawaian dan Organisasi, belanja non operasional 23 Miliar 500 juta, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Belanja Pegawai 001 Rp52.907.720.000, belanja non operasional Rp5.092.280.000. Total di Biro Keuangan dan BMN, 58 Miliar.

Biro Umum dan Layanan Pengadaan, belanja operasional Rp86.391.231.000, belanja non operasional Rp13.608.769.000, total untuk Biro Umum dan Layanan Pengadaan 100 Miliar. Sehingga untuk Sekretariat Jenderal total anggaran untuk 2023 jumlah 225 Miliar. Komposisinya bila kita persentasikan untuk Biro Umum dan Layanan Pengadaan 44%, Biro Hukum 3%, Biro Humas 6%, Biro Perencanaan dan Kerja Sama 11%, Biro Kepegawaian dan Organisasi 10% dan Biro Keuangan Barang Milik Negara 26% dari total Pagu Sekretariat Jenderal.

Output prioritas pada RKA K/L Pagu Anggaran 2023 untuk Biro Hukum yang kami laporkan tadi 6,5 Miliar, antara lain dipakai untuk layanan *legal drafting* dan naskah perjanjian hukum, yang berikut dua layanan untuk penyuluhan dan informasi hukum, yang ketiga satu layanan untuk tata usaha biro, dua layanan advokasi atau bantuan hukum, tiga layanan untuk fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, berikutnya satu layanan penelaahan dan sosialisasi produk peraturan perundang-undangan.

Output prioritas untuk Biro Hubungan Masyarakat Pagu 13 Miliar antara lain: layanan pengaduan masyarakat dua layanan, pengaduan dan termasuk tindak lanjut dari pengaduan yang diterima. Kemudian, dua layanan untuk hubungan antar lembaga dalam dan luar negeri, satu layanan tata usaha biro, satu layanan untuk informasi publik, tiga layanan untuk pemberitaan dan publikasi melalui media massa, media pembelajaran, dan media sosial, satu layanan untuk perpustakaan kementerian, dan satu layanan pengelolaan data kehumasan kementerian.

Output prioritas untuk Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Pagu 24 Miliar antara lain: dua layanan untuk perencanaan manajemen kinerja, tiga layanan untuk perencanaan program dan anggaran kementerian, satu layanan untuk tata usaha biro, tiga layanan untuk evaluasi dan pelaporan kegiatan kementerian, tiga layanan untuk program kerjasama kementerian, satu dokumen untuk pelaporan kinerja kementerian dan empat layanan dukungan untuk pinjaman luar negeri pada program P3PD, Bank Dunia.

Output prioritas untuk Biro Kepegawaian dan Organisasi Pagu 23,5 Miliar antara lain: penempatan dan mutasi pegawai 350 orang, layanan administrasi kepegawaian khususnya PNS 2.256 orang, layanan untuk administrasi kepegawaian PPNPN 1.039 orang, pelayanan tata usaha biro satu layanan, empat dokumen untuk pengolahan data dan informasi kepegawaian, kemudian pengembangan kompetensi pegawai sebanyak 530 orang, tiga dokumen untuk penataan organisasi dan tata laksana serta penguatan reformasi birokrasi kementerian, serta satu dokumen penyusunan laporan kepegawaian dan organisasi.

Berikutnya *output* prioritas pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara dengan Pagu 58 Miliar antara lain: layanan gaji dan tunjangan ASN jumlah pegawai 378 orang, kemudian manajemen keuangan dan perbendaharaan 10 dokumen atau 10 laporan, dua layanan penatausahaan barang milik negara dan layanan tata usaha biro sebanyak satu layanan.

Output prioritas untuk Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Pagu 100 Miliar antara lain: layanan operasional dan pemeliharaan kantor selama 12 bulan antara lain gedung kantor di Jalan Abdul Muis dan di Jalan Kalibata, kemudian satu layanan pengadaan barang dan jasa, empat pelayanan ketatausahaan pimpinan, kemudian dua layanan perkantoran dan renovasi gedung maupun bangunan, layanan rumah tangga selama satu tahun, layanan keprotokolan satu layanan, layanan klinik Pratama dua layanan baik di Jalan Abdul Muis maupun kantor yang di Kalibata, kemudian satu layanan pengelolaan sarana kerja kementerian, dan satu layanan untuk kearsipan.

Pokok bahasan yang ketiga, Usulan Penyesuaian Alokasi Program dan Anggaran dalam RAPBN 2023 dengan memperhatikan hasil Raker Kementerian dengan Komisi V. Mohon izin, kami menyampaikan secara umum untuk seluruh unit kerja Eselon I di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yang nanti secara detail disampaikan oleh masing-masing pimpinan unit kerja.

Untuk Inspektorat Jenderal, semula untuk Nota Keuangan RAPBN 2023 Program Dukungan Manajemen 51.750.000.000, setelah memperhatikan masukkan dan hasil Raker terjadi pergeseran, berkurang Rp2.000.076.000 sehingga menjadi total Pagu untuk Inspektorat Jenderal menjadi Rp49.674.000.000. Yang kedua, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan semula 61 Miliar untuk dukungan dan 167 Miliar lebih untuk program teknis dengan Pagu total di Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Rp229.216.528.000 digeser dan menjadi total Pagu untuk Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Rp234.356.528.000 pergeseran bertambah.

Kemudian, untuk Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, total Pagu Anggaran 2023 adalah Rp211.470.248.000 setelah memperhatikan hasil Raker berubah menjadi total Rp230.459.248.000. Berikutnya, Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal total Pagu berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2023 Rp93.628.634.000, berubah menjadi Rp90.564.634.000 atau berkurang dari total Pagu awal. Kemudian, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi total Pagu Anggaran 2023 adalah Rp258.286.559.000, terjadi pergeseran dan menjadi Rp251.553.559.000.

Berikutnya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi total Pagu 2023, Rp1.792.892.120.000 terjadi pergeseran menjadi Rp1.787.913.120.000. Sekretariat Jenderal, total Pagu 225 Miliar terjadi pergeseran menjadi Rp221.170.000.000. Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, total Pagu Rp134.786.762.000 menjadi Rp131.339.762.000. Sehingga, hasil rekapitulasinya adalah total Pagu

untuk Kementerian Desa menurut Nota Keuangan RAPBN 2023, Rp2.997.030.851.000. Tetap, hanya terjadi pergeseran dari dukungan manajemen sebesar Rp22.147.112.000 dari angka sebelumnya dukungan manajemen Rp723.811.016.000 menjadi Rp701.663.904.000.

Demikian, untuk usulan penyesuaian alokasi program Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2023. Khusus untuk Sekretariat Jenderal, terjadi pergeseran yang kami sampaikan tadi dari angka 225 Miliar menjadi hanya Rp221.170.000.000 ada Pagu yang direalokasi sebesar 3.830.000.000 ke program teknis di masing-masing Direktorat Jenderal Teknis, sehingga, kami izin menyampaikan untuk usulan atau *output* prioritas pada Sekretariat Jenderal tidak terjadi pergeseran pada *output* prioritas karena menyangkut dengan IKU, Pimpinan dan Anggota yang kami hormati hanya terjadi efisiensi dan optimalisasi dari dukungan manajemen di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Pokok bahasan yang keempat, yang perlu kami dilaporkan pada kesempatan yang baik ini adalah usulan program-program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus, berdasarkan kriteria teknis dari komisi. Arah kebijakan DAK.

Pimpinan dan Anggota yang kami hormati,

Adalah transportasi pada tahap pedesaan, arah kebijakan ini mengacu pada dukungan terhadap RPJMN 2020-2024, Prioritas Nasional dua kegiatan, prioritas ke-4 yaitu pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi. Arah kebijakannya adalah peningkatan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas penumpang dan barang terhadap pusat pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah di daerah afirmasi. Tujuannya, mengurangi kesenjangan wilayah dengan meningkatkan mobilitas dan konektivitas sebagai penumpang dan barang melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi di daerah afirmasi. Sasarannya adalah meningkatnya kualitas pelayanan dan pergerakan penumpang dan barang menuju pusat layanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah didukung oleh penyediaan energi di daerah afirmasi.

Untuk peran Kementerian/Lembaga dalam perencanaan DAK mohon izin kami langsung saja pada *slide* berikut, peran dari masing-masing kementerian terkait. Untuk Kementerian PPN atau Bappenas adalah menetapkan kebijakan DAK berdasarkan tema RKP dan target RPJMN, menetapkan kriteria alokasi prioritas, penetapan alokasi prioritas, mengkoordinasikan pertemuan para pihak di tingkat pusat berupa *trilateral meeting* maupun *multilateral meeting*, kemudian menyiapkan sistem informasi untuk proses perencanaan DAK fisik kemudian bersama Kementerian Keuangan menetapkan Pagu Indikatif DAK.

Untuk Kementerian Keuangan antara lain perannya berupa mengkoordinasikan proses penyusunan dan pembahasan penetapan alokasi anggaran DAK fisik, mengkoordinasikan penyusunan regulasi petunjuk teknis

DAK fisik bersama Bappenas dan Kementerian Teknis lainnya, kemudian menetapkan regulasi tentang mekanisme penyaluran DAK fisik.

Untuk Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi antara lain mengkoordinasikan proses perencanaan DAK Transportasi Pedesaan dengan Pemda melalui forum asistensi, forum sinkronisasi usulan dan forum finalisasi rencana kegiatan. Peran yang berikut adalah bersama dengan Bappenas menetapkan kriteria teknis menu kegiatan DAK Transportasi Pedesaan, berikutnya adalah mengusulkan menu kegiatan DAK Transportasi Pedesaan ke Bappenas dan Kementerian Keuangan, yang berikut menyusun regulasi tentang petunjuk operasional pelaksanaan kegiatan DAK transportasi pedesaan dengan mengacu kepada petunjuk teknis DAK fisik.

Sedangkan, untuk Kementerian Dalam Negeri perannya berupa melakukan penilaian usulan untuk memastikan usulan kegiatan sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 di mana sebagai dasar dalam penetapan organisasi perangkat daerah pelaksanaan DAK fisik di daerah. Berikut peran dari Kementerian Dalam Negeri adalah pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan DAK dalam pelaksanaan APBD.

Kami izin melaporkan perkembangan alokasi dan realisasi DAK Transportasi Pedesaan sejak 2017 sampai dengan 2023, di mana terjadi penurunan dari sebelum Tahun 2022, 1 Triliun kemudian untuk 2023 menjadi hanya Rp750 Miliar. Pagu Alokasi DAK Transportasi Perdesaan melalui fluktuatif, terjadi fluktuatif sejak 2017 sampai 2023 dengan Pagu terendah senilai 692 Miliar di Tahun 2020 dan Pagu tertinggi senilai 1,5 Triliun di Tahun 2019. Sejak 2017 sampai dengan 2021 realisasi DAK Transportasi Perdesaan selalu di atas angka 83%, meskipun sempat mengalami penurunan dari 88,60% di Tahun 2018 menjadi 83,60% di Tahun 2019. Realisasi kembali membaik menjadi 86,70% di Tahun 2020, dan 88,20% di Tahun 2021.

Adapun yang kami laporkan juga termasuk lokasi prioritas DAK Transportasi Perdesaan pada saat *slide* berikut. Dasar regulasi daerah afirmasi daerah tertinggal mengacu pada PP 78 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal kemudian Perpres 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, Tahun 2020-2024, kemudian kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, alokasi prioritas kawasan perbatasan berdasarkan rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan pedesaan, maaf, kawasan perbatasan Tahun 2020-2024, kemudian, mengacu ke kawasan transmigrasi 52 kawasan transmigrasi prioritas pada RPJMN 2020-2024, serta afirmasi untuk Papua berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, sehingga untuk Tahun 2021 terdapat 183 kabupaten dan kota seluruh daerah afirmasi ditetapkan sebagai lokasi prioritas DAK transportasi pedesaan. Kemudian 2022, 83 kabupaten dan kota, sedangkan di Tahun Anggaran 2023 terdapat 84 kabupaten daerah afirmasi di kawasan barat dan timur Indonesia dengan kriteria: satu, kapasitas fiskal dengan kategori sedang atau sangat rendah, kemudian indeks keterjangkauan dengan kategori rendah.

Berikut lokasi-lokasi prioritas akan kami sampaikan atau mohon izin sudah kami sampaikan ke Pimpinan dan Anggota sekalian yang kami hormati melalui Sekretariat Komisi V DPR RI. Demikian, untuk Sekretariat Jenderal apa yang kami bisa laporkan pada kesempatan yang baik ini, lebih kurang kami mohon maaf dan nanti mohon izin dilanjutkan oleh Irjen dan Kepala BPSDM maupun Kepala BPI.

Mohon izin, terima kasih.

Selamat siang.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Sekjen.

Untuk kesempatan berikutnya kami persilakan ke, Pak Irjen. Silakan, Pak.

PLT. IRJEN KEMENDES PD TT RI (Ir. EKO SRI HARYANTO, M.M):

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak Pimpinan Komisi V DPR RI,
Yang kami hormati Bapak-Ibu Anggota Komisi V DPR RI,**

Pada kesempatan yang baik ini kami akan sampaikan terkait dengan pelaksanaan evaluasi, untuk khususnya di ruang dan tugasnya di Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Adapun, yang kami akan sampaikan yang pertama tentang Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2022 lalu RKP dan Pagu Anggaran Irjen Tahun 2023 dan berikutnya adalah usulan penyesuaian alokasi program dan anggaran, Tahun Anggaran 2023.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Pada kesempatan yang baik ini juga kami akan sampaikan lingkup kerja di Inspektorat Jenderal, karena ini nanti terkait dengan *mandatory* yang dikerjakan oleh masing-masing di inspektorat. Yang pertama dan Inspektorat I itu adalah membawahi atau memberikan layanan terhadap Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Inspektorat II itu di Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan juga Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Inspektorat III itu adalah memberikan layanan terhadap Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Badan Pengembangan dan Informasi atau BPI. Yang berikutnya adalah Inspektorat IV itu adalah

memberikan layanan kepada Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, yang berikutnya juga Inspektorat Jenderal. Nah, Inspektorat V itu khusus tentang pengawasan dana desa dan investasi khusus.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Selanjutnya, kami akan sampaikan evaluasi pelaksanaan Tahun 2022. Lanjut. Pada kesempatan yang baik ini, kami mendapatkan kepercayaan untuk alokasi Rp51.693.093.000 ini adalah Pagu sebelum adanya *automatic adjustment*. Namun demikian, di perjalanan ada *automatic adjustment* untuk Tukin di 13 dan 14 itu 1,6 Miliar yang untuk tahap *automatic adjustment* untuk tahap 1 itu adalah 5,2 Miliar dan untuk yang tahap kedua itu 6,96 Miliar sehingga Pagu Efektif yang kita lakukan itu adalah Rp37.867.825.000 jadi karena ada *automatic adjustment*.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2022, ini sebelum dilakukan blokir kita ada 50,06% tadi realisasi, menggunakan realisasi yang patokan ini adalah SP2D, jadi pencairan yang *real* yang dilakukan. Kita perhatikan di dalam hal ini di Sekretariat Inspektorat Jenderal itu adalah realisasi 21,3 Miliar atau 58%. Inspektorat I, itu adalah realisasinya adalah 1,05 Miliar atau 36,31%, Inspektorat II itu realisasinya adalah 890 juta, mohon maaf, Miliar, realisasi adalah 28,73%. Inspektorat III, itu realisasi adalah 843 juta dan realisasi ini adalah 27,21%. Inspektorat IV, itu adalah 620 juta, terealisasi adalah 22,16%. Inspektorat V itu realisasi adalah 1,1 Miliar itu setara dengan 35,53% sehingga total apa yang di, dari keseluruhan adalah 50,06%.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Lanjut saja, Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2022 kalau kita perhatikan di dalam hal ini adalah 25 realisasi keseluruhan, baik itu sesuai dengan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, jumlahnya adalah 25,8 Miliar, sehingga kalau kita perhatikan dalam hal ini, realisasi belanja, itu realisasi belanja pegawai 56 Miliar. Mohon maaf, belanja pegawai 56%, belanja modal 3% dan belanja barang 41%. Kurva S, dari penarikan dana, lanjut, kami masih ada sisa atau jeda 9,11% karena target kita adalah 90, mohon maaf, 59,17% tapi kita baru bisa mencapai 50,06%. Sehingga kita terus menyusun lebih detail nanti di dalam kegiatan sampai akhir tahun.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Di dalam capaian *output* Tahun 2022, lanjut, jadi masing-masing kegiatan di masing-masing Inspektorat dan Sekretariat. Di Sekretariat, kita bisa mencapai 78,79% ini layanan-layanan yang dilakukan di Sekretariat adalah layanan manajemen kinerja internal realisasi 32 dari 67 laporan, layanan dukungan manajemen internal realisasi 5 dari target 5 layanan, lalu juga perangkat pengolah data dan komunikasi (TIK) realisasi 64 dari 78 unit, layanan sarana prasarana internal realisasi 29 dari target 29 dan pendidikan

dan pelatihan realisasi 77 dari target 67 pegawai, jadi melebihi dari target. Jadi, total keseluruhan sebenarnya di Sekretariat sudah kita mencapai 78,79%.

Yang berikutnya adalah Inspektorat I sampai Inspektorat V, ini adalah yang teknis yang terkait dengan layanan di masing-masing layanan sesuai dengan tugasnya di UK1 tadi. Inspektorat I, ini targetnya 37 laporan realisasi 26 laporan dan 26 laporan lainnya. Jadi, 26 layanan untuk sesuai target itu pasti terkait dengan *mandatory*. Jadi, kami sebutkan di sini adalah laporan tentang audit kinerja maupun keuangan perlu laporan juga TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan), laporan terkait dengan RKA K/L, laporan *review* anggaran, revisi, lalu juga laporan *review* keuangan, *review* tentang PIPK, *review* tentang Lapkin (laporan kerja), evaluasi sakin, laporan tentang monev PRB penilaian mandiri untuk pelaksanaan reformasi birokrasi, lalu laporan monev untuk zona integritas WBK dan WBBM. Yang berikutnya juga, laporan *review* untuk pengadaan barang jasa, ini yang terkait dengan laporan yang sesuai dengan target. Laporan lainnya yaitu terkait dengan laporan *review* tentang SBK, laporan hasil revisi untuk *automatic adjustment*, laporan TLHP, laporan *monthly audit* yang tiap bulan dilakukan lalu laporan *review* pengawasan PBJ.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Ini untuk di Inspektorat I, Inspektorat II targetnya 35 laporan realisasi 20 laporan sesuai dengan target dan 19 laporan lainnya. Ini sama, artinya beberapa kegiatan *mandatory* yang dilakukan oleh Inspektorat I juga. Target, targetnya sudah ada 20 laporan sehingga kita bisa mencapai 64,29% untuk Inspektorat II.

Berikutnya adalah Inspektorat III ini target 34 laporan realisasi ada 20 laporan sesuai target dan 24 laporan lainnya sehingga jumlahnya 44,66%. Inspektorat IV, targetnya 34 laporan realisasi 23 laporan sesuai target dan 22 laporan lainnya. Ini persentasenya yang dicapai 50,92%. Inspektorat V target adalah 18 laporan, realisasi 7 laporan sesuai dengan target atau setara dengan 35,63% karena ini khusus untuk pengawasan dana desa dan investigasi khusus, jadi ini berbeda dengan *mandatory* dari Inspektorat I sampai Inspektorat IV. Audit investigasi realisasi 1 sampai 2, di laporan semesteran untuk yang Inspektorat V lalu juga tela'ah pengaduan dana desa realisasi dua laporan dari empat laporan triwulan. Yang berikutnya juga pemantauan dan koordinasi tindak lanjut hasil tela'ah pengaduan dana desa, realisasi dua laporan dari empat laporan triwulan.

Yang berikutnya, antara pengelolaan tata kelola WBS realisasi satu dari empat laporan triwulan, yang berikutnya adalah penanganan gratifikasi realisasi satu dari empat laporan triwulan.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Kegiatan pencegahan korupsi, lanjut, ada 6 (suara kurang jelas) yang memang kita perhatikan dan kita menjadi tanggung jawab di dalam menjamin pelaksanaan kegiatan di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Yang pertama adalah pengendalian gratifikasi, ini adalah bimtek *online* pengendalian

gratifikasi melalui website KPK, kita bersama KPK lalu konsolidasi dengan sub unit pengendalian gratifikasi di UK1. Yang berikutnya juga zona integritas menuju WBK dan WBBM, ini juga kita lakukan yang berikutnya tentang perjanjian kerja sama TPK terintegrasi dengan KPK yaitu adalah WBS. Yang keempat adalah rencana aksi saber pungli. Ini kegiatannya sosialisasi, monev, optimalisasi kanal pengaduan dan pelaksanaan saber pungli. Kegiatan yang keempat, yang kelima, mohon maaf, adalah survei penilaian integritas, ini adalah sosialisasi survei penilaian integritas dan peningkatan integritas pegawai. Yang keenam adalah manajemen risiko ini pendampingan UK1 dalam penyusunan manajemen risiko karena terkait dengan kegiatan-kegiatan baik itu di pusat maupun di daerah jadi menyusun risiko supaya lebih dini untuk bisa mengetahui tentang risiko-risiko yang dilakukan.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Kami sampaikan untuk penanganan pengaduan untuk dana desa, Tahun 2019 sampai Tahun 2022. Untuk Tahun 2022, jumlah pengaduan kita yang kita kelola ada 101 sampai bulan Agustus ini. Jadi, tindak lanjutnya adalah 58 paduan atau 67% dan tidak *ditinjut*, tidak *ditinjut* itu 29 aduan atau 33%. Proses *tinjut* ada 14 dan *tinjut* untuk APIP 4 dari 58. Jadi, kalau kita bandingkan dengan progres dari Tahun 2019 sampai '22, ini jumlah aduan dari 19, 27, lalu 20, 20 itu ada 416 lalu menurun lagi Tahun 2020-2021 itu 123 dan 2022, ini saat ini kita masih 101.

Nah, yang berikutnya adalah penyebab pengajuan tidak dapat ditindaklanjuti, dari, dari 29 aduan atau 33% tadi, di antaranya adalah identifikasi pelapor dan *contact person* tidak jelas atau tidak dilampirkan sehingga tidak bisa kita tindaklanjuti, lalu juga pengaduan yang disampaikan tidak dapat dijabarkan atas indikasi penyelewengan dana desa, lalu kelengkapan pengaduan tidak dilengkapi bukti-bukti yang jelas tentang penyimpangan pengaduan dana desa dan pengaduan bukan kewenangan dari Kementerian Desa, bisa juga kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri misalnya terkait dengan pemerintahan.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Di dalam penanganan pengaduan dana desa kalau kita perhatikan itu ada di *dua puluh*, ini yang paling tinggi adalah Sumatera Utara dari di antara ini adalah Sumatera Utara karena di situ ada 23 pengaduan yang kita tangani. Jadi, kalau yang paling sedikit di Banten, Gorontalo, Laweh satu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jogjakarta, KPK RI juga termasuk bagian yang menyampaikan pengaduan dan ini sudah kita kelola. Lalu presentase pengaduan, kalau dari 101 pengaduan tadi, yang tidak layak tindak lanjut adalah 33%, layak adalah 67%. Hasil tela'ah dari 87 pengaduan itu selesai tela'ah itu 86%, jadi proses masih 14% jadi kita karena ini adalah sifatnya adalah koordinasi dengan APIP daerah sehingga membutuhkan waktu sampai nanti akhir Tahun 2022. Ini terus kita lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri, karena ini adalah kewenangan-kewenangan di desa.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Berikutnya, kami akan sampaikan Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu Anggaran Tahun 2023. Pagu Anggaran Tahun 2023 Inspektorat Jenderal itu adalah 51.750.000.000 ini terdiri dari operasional dan non operasional. Jadi, operasionalnya adalah 48 dan non operasional 52%. Dari belanja operasional itu, ada Rp24.888.778.000, itu terdiri dari gaji pegawai, gaji pramubakti, supir, tenaga pengamanan, honor, dan operasional satker. yang berikutnya adalah layanan perkantoran ini untuk kegiatan belanja operasional. Yang belanja non operasional itu 26,8 Miliar, digunakan untuk kegiatan-kegiatan dukungan di Sekretariat Inspektorat Jenderal, lalu kegiatan pengawasan di Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV dan Inspektorat V sesuai dengan tugas fungsinya.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Di Rencana Kerja Pagu Anggaran Tahun 2023, untuk dukungan manajemen ini adalah 37 Miliar, yang berikutnya adalah layanan pengawasan untuk internal pada Sekjen dan BPSDM, ini karena Inspektorat I ini dua layanan 2,7 Miliar. Layanan pengawasan internal pada Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Ditjen PPDT ini di Inspektorat II, ini layanan dan jumlah anggarannya adalah 3 Miliar. Layanan Pengawasan Internal pada Ditjen PPK Trans dan BPI, ini dua layanan karena dua UK2, ini juga 3 Miliar. Layanan pengawasan internal dan Ditjen PDB dan Irjen sendiri itu dua layanan itu 3 Miliar. Layanan investasi khusus dan pengawasan pengaduan untuk dana desa 3 Miliar, jadi jumlahnya adalah 51.750.000.000.

Rencana *output* yang akan dilakukan Tahun 2023. Sekretariat Inspektorat Jenderal targetnya adalah 74 unit atau 95 laporan selama 12 bulan dan 115 orang. Di Inspektorat I, targetnya adalah dua layanan itu ada 75 laporan selama 12 bulan, ini adalah menjalankan *mandatory* yang tadi sudah kami sebutkan. Yang berikutnya adalah Inspektorat II, targetnya adalah dua layanan Inspektorat II, dua UK yang dilayani, ini 74 laporan di 12 bulan. Yang berikutnya adalah Inspektorat III, ini juga dua layanan 74 laporan di 12 bulan. Inspektorat IV itu adalah dua layanan 73 laporan 12 bulan. Inspektorat V targetnya adalah dua layanan 50 laporan selama 12 bulan.

Bapak-Ibu yang kami hormati dan kami muliakan,

Selanjutnya, kami ingin sampaikan Usulan Penyesuaian Alokasi Program dan Anggaran Tahun 2023 sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Sekjen. Usulan untuk penyesuaian alokasi Pagu Anggaran Tahun 2023, jadi Pagu Anggaran Tahun 2023, yang awalnya itu dari masing-masing UK, mohon maaf di masing-masing di UK2 untuk dukungan manajemen, dukungan teknis lainnya Inspektorat Jenderal itu ada 37 Miliar, lalu layanan untuk pengawasan internal, layanan untuk pengawasan internal di Setjen dan BPSDM itu 2,7 Miliar. Layanan pengawasan internal pada Ditjen PI dan PPDT itu 3 Miliar. Layanan pengawasan internal, di Ditjen PPK Trans dan BPI 3 Miliar. Layanan pengawasan internal Ditjen PDP dan Irjen 3 Miliar. Layanan investasi

khusus dan pengawasan pengguna dana, 3 Miliar. Akhirnya kita lakukan penyesuaian sehingga ada pengurangan di dalam hal ini atau selisih. Jadi, kalau kita total dari masing-masing UK2 tadi sudah ada pengurangan dan selisihnya jumlahnya adalah 2.076.000.000 sehingga sesuai dengan usulan penyesuaian Pagu, jumlah kita dari 51.750.000.000 menjadi 49.674.000.000.

Usulan penyesuaian alokasi Pagu Anggaran kita sesuaikan dengan Pagu yang direncanakan kemudian dengan total 99,6 Miliar, yaitu adalah non operasional 50% dan operasional 50%. Belanja untuk operasional 24,8 Miliar itu untuk gaji, untuk pramubakti, supir, tenaga pengamanan, honor operasional satker dan layanan perkantoran. Belanja non operasional itu 24,6 Miliar untuk dukungan kegiatan di Set Irjen lalu Inspektorat I sampai V, ini yang kita lakukan.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Usulan penyusunan alokasi Pagu Anggaran Tahun 2023 itu terjadi perubahan-perubahan *output* akibat penyesuaian alokasi Pagu Anggaran. Pada kesempatan yang baik ini, karena memang kita akhirnya akan melakukan karena kita selalu berprinsip pada efektif dan efisien sehingga kita hanya mengurangi pada *sampling* pelaksanaan audit tapi tidak mengurangi dari *output* yang akan dicapai, baik itu sifatnya adalah layanan-layanan yang tadi yang terkait dengan laporan, jadi semua tidak ada perubahan.

Demikian, yang dapat kami sampaikan Bapak Pimpinan dan para Anggota Komisi V yang saya hormati dan kami muliakan. Selanjutnya, kami mohon untuk masukkan dan arahan berikutnya.

Demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Irjen. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Kepala Badan Pengembangan SDM, silakan Bu.

KEPALA BPSDM PMDTT KEMENDES PDTT RI (Prof. Dr. LUTHFIYAH NURLAELA, M.Pd.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat siang,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Shalom,

Om swastiastu,

Namo budhaya,

Salam kebajikan,

Yang saya hormati, Bapak Ketua dan Anggota Komisi V DPR,

Mohon izin, menyampaikan laporan dari BPSDM terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 sampai Agustus 2022 dan alokasi anggaran menurut fungsi program dan prioritas anggaran Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2023. Untuk pertama sebagai pendahuluan mohon izin menyampaikan tugas dan fungsi BPSDM. *Next.* Bahwa tugas kami adalah melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa dan pedesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi dan fungsi kami BPSDM adalah penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia. Untuk fungsi yang kedua adalah pelaksanaan dari penyusunan kebijakan teknis dan program serta untuk fungsi yang ketiga adalah pemantauan evaluasi dan pelaporan.

Kemudian, untuk gambaran terkait dengan struktur organisasi BPSDM dan PMPDPT di BPSDM ada lima Eselon II yaitu Sekretariat Badan, kemudian pusat-pusat, ada empat pusat dan juga ada sembilan Balai, dua Balai besar, dan tujuh Balai sebaran dari UPT, *next*, sebaran dari UPT Balai Besar dan Balai, untuk Balai Besar ada di Jogja, di Jakarta, dan di Jogjakarta. Kemudian untuk Balai ada di Pekanbaru, Banjarmasin, Makassar, Ambon, Bengkulu, Jayapura, dan Denpasar. Kemudian, wilayah kerja dan fokus prioritas setiap Balai memiliki wilayah kerja dan fokus prioritas misalnya di Jakarta wilayah kerjanya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Kalimantan Barat dengan fokus prioritas IT atau *e-commerce* dan seterusnya masing-masing Balai Besar atau Balai memiliki wilayah kerja dan fokus prioritas. *Next.*

Selanjutnya, mohon izin untuk menyampaikan Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Agustus 2022. Untuk Pagu Alokasi APBN Tahun Anggaran 2022 persatker di BPSDM mulai dari Sekretariat, kemudian Pusat PPMD, Pusat PSDM, Pusat ASN, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan di dua UPT Balai Besar serta tujuh UPT Balai, total Pagu sebesar 1,8 T. 1,8 Triliun. Dan, terbagi dalam belanja pegawai sebesar 64,1 M, kemudian belanja barang yang di sana ada rupiah murni dan PHLN sebesar 1,7 Triliun. Kemudian, untuk belanja modal yang juga terbagi dalam rupiah murni dan PHLN sebesar 11,2 M. Kemudian, untuk belanja modal *loan*, khusus untuk belanja modal yang *loan* adalah untuk pengembangan *online*, video *platform* Akademi Desa 4.0, kemudian untuk produksi video pembelajaran berbasis komunitas, produksi video pembelajaran berbasis kompetensi dalam bentuk kurasi, kemudian pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Akademi Desa berkelanjutan dan kampanye informasi pembangunan desa.

Selanjutnya, untuk rincian blokir dan usulan buka blokir di mana Pagu untuk BPSDM 1,8 Triliun yang kemudian ada blokir tunkin 13 dan 14 juga AA1 dan AA2, dan pada saat ini sedang melakukan usulan untuk buka blokir yaitu sebesar lima koma, Rp5.095.168.000 yang rencananya dialokasikan untuk pelatihan calon transmigrasi delapan angkatan, kemudian pelatihan desa wisata tujuh angkatan, pelatihan pengelolaan Bumdes 13 angkatan, juga untuk

validasi penyusunan modul pelatihan berbasis SDGs Desa, kemudian juga untuk Bimtek dan *refreshment* para *assesor* yang ini untuk persiapan uji kompetensi tenaga pendamping profesional dan selanjutnya untuk penyusunan kurikulum pelatihan PSM berbasis kompetensi sehingga untuk Alokasi Pagu setelah buka blokir menjadi 1,7 Triliun.

Selanjutnya, untuk kurva S, Rencana Penarikan Dana Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022, untuk realisasi keuangan sampai 31 Agustus 2022 sebesar 53,86% atau 972 M, kemudian untuk realisasi fisik sebesar 54,67% atau 986,7 M. Ada rencana dan realisasi ada deviasi 5,27% yang ini terbagi dari jenis belanja pegawai sebesar 65,42% kemudian, belanja barang 53,73% dan belanja modal 8,5%. Sehingga total untuk realisasi keuangan ini adalah 53,86%.

Selanjutnya, untuk progres kegiatan Tahun Anggaran 2022, *output* pendampingan desa targetnya 35.000 orang realisasi 34.183 orang. Kemudian untuk kebijakan pendampingan desa dan pemberdayaan masyarakat desa targetnya adalah tiga dokumen yaitu pedoman pemberdayaan masyarakat desa, pedoman pengembangan model pemberdayaan masyarakat serta panduan pendampingan kawasan transmigrasi, tetapi ini terkena AA, kemudian tenaga pendamping profesional yang ditingkatkan kapasitasnya targetnya adalah 15.000 orang dan realisasi sampai saat ini 179 orang namun pada bulan September minggu ini, akan dilaksanakan lagi ToT ke-4 yang saat ini sudah kami laksanakan adalah tiga kali ToT dan satu kali MoT.

Kemudian, untuk progres kegiatan TA 2022 masih terkait dengan progres kegiatan, untuk pelatihan masyarakat desa targetnya adalah 4.143 orang, pada saat ini realisasinya 1.621 orang, kemudian pengembangan desain *online video platform* Akademi Desa 4.0, saat ini sudah masuk pada *no/step* Bank Dunia dan pengadaan pada saat ini sedang proses kontrak. Kemudian, untuk kampanye informasi pembangunan desa ada 17 video kampanye informasi pembangunan desa sudah pada *no/step* juga dan pada saat ini proses pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, untuk produksi konten video pembelajaran pada modul pelatihan dan dokumen teknis pendukung dan sebagainya dan pada saat ini sedang proses pelaksanaan pekerjaan karena sudah pada step, pada *no/step* Bank Dunia pada sejak 26 Mei 2022.

Kemudian, untuk jumlah bahan kebijakan dan regulasi pelatihan yang dihasilkan selama 2022 ini targetnya empat dokumen tapi realisasinya adalah sembilan dokumen. Kemudian, untuk fasilitasi pemanfaatan berkelanjutan Akademi Desa targetnya adalah 120 orang calon pelatih dan saat ini sudah mendapatkan nol dari Bank Dunia dan sekarang sedang proses pelaksanaan pekerjaan. Kemudian, untuk pelatihan struktural atau fungsional targetnya adalah 347 orang realisasinya adalah 329 orang, saat ini sebagian besar masih sedang berjalan dan kemudian pelatihan teknis targetnya 131 orang realisasinya 46 orang.

Kemudian, untuk NSPK pengembangan jabatan fungsional tertentu, ada dua kegiatan yaitu *review* Permen serta *review* standar kompetensi yang kena AA, sehingga kami belum bisa melanjutkan dan ada tiga naskah

akademik jabatan fungsional baru yang saat ini sedang menunggu *expose* dari Kemenpan-RB yaitu jabatan fungsional perancang wilayah pedesaan, analisis sarana prasarana, dan analisis sosial budaya pedesaan. Kemudian, untuk peningkatan kapasitas, kapasitas jabatan fungsional PSM targetnya adalah 1.000 orang pada saat ini realisasinya masih 424 orang. Kemudian, juga penetapan angka kredit pejabat fungsional PSM targetnya adalah 150 namun realisasinya jauh lebih besar yaitu 606 orang dan ini berasal dari 355 berasal dari Kemendesa PD TT dan 251 orang berasal dari luar Kemendesa PD TT.

Untuk realisasi pelatihan sampai dengan September 2022 di Balai Besar dan Balai-Balai, baik itu pelatihan Bumdes, Desa Wisata, Catrans dan Ekonomi Kreatif dapat kami laporkan bahwa sebagian besar kegiatan masih belum bisa mencapai target, hanya beberapa saja yang mencapai target. Kegiatan pelatihan Bumdes ada di Balai Jakarta, Balai Jogjakarta, Pekanbaru, Bengkulu, Banjarmasin, di Denpasar, Makassar, Ambon, dan Jayapura sebagian besar masih belum memenuhi target, kemudian Desa Wisata juga ada di semua Balai yang kami sebutkan tadi, Catrans ada di beberapa Balai di semua Balai kecuali ada, kecuali di Pekanbaru dan Ambon tapi sebagian masih terkena AA sehingga belum bisa dilaksanakan. Begitu juga dengan pelatihan ekonomi kreatif satu-satunya ada di Balai Jogja juga masih belum bisa dilaksanakan begitu juga dengan kegiatan pelatihan kemaritiman yang ada di Ambon juga masih belum bisa dilaksanakan karena terkena AA.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Selanjutnya, mohon izin kami untuk menyampaikan alokasi anggaran menurut fungsi dan Program Prioritas Anggaran Kementerian dan Lembaga Tahun Anggaran 2023 yang kami bagi menjadi dua yaitu alokasi program dan anggaran sesuai dengan nota keuangan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023. Alokasi Pagu Anggaran total Pagu Anggaran 2023 sebesar 1,7 Triliun yang terbagi dalam gaji dan tunjangan, kemudian juga belanja operasional dan belanja non operasional. Kemudian, untuk total Pagu tersebut terdiri dari program dukungan manajemen 130,9 M dan program teknis 1,6 Triliun. *next* untuk Alokasi Anggaran TA. 2023, sebagaimana yang kami rinci pada Pagu Indikatif 2023 dan juga Pagu Anggaran 2023 meliputi unit kerja mulai dari Sekretariat, pusat-pusat, dan juga Balai Besar serta Balai-Balai dengan total Pagu 1,7 Triliun. Kemudian, *next*.

Untuk ini adalah rincian kegiatan KRO, RO, dan komponen yang kami tidak perlu menyampaikan secara rinci tapi bisa dicermati di sana dan mohon izin untuk langsung menyampaikan target *output* prioritas yaitu pada rancangan kerja, Rencana Kerja Pagu Indikatif 2023, yang pertama adalah untuk peningkatan pembelajaran masyarakat melalui Akademi Desa 4.0 yang ini adalah Program P3PD, pinjaman luar negeri bank dunia yaitu volumenya adalah 32.000 orang dengan alokasi 19,9 M. Kemudian, untuk pendampingan Desa volumenya adalah 35.000 orang di 74.962 Desa, untuk anggarannya adalah 1,5 Triliun. Kemudian, untuk peningkatan kapasitas ASN volumenya ada 500 orang dengan besar anggaran 3,5 M. Pelatihan Masyarakat 7.500 orang dengan besar anggaran 32 M dan peningkatan kapasitas pendamping desa yang ini juga P3PD, PLN, Bank Dunia volumenya adalah 15.800 orang

dengan anggaran 52,5 M. Untuk rencana sebaran pelatihan bisa dicermati seperti yang kami sampaikan tadi targetnya adalah 7.500 orang dengan besar anggaran sekitar 32 M.

Selanjutnya, usulan penyesuaian alokasi program dan anggaran dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan masukkan mitra Komisi V DPR RI.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Ada penyesuaian di sana karena terdapat realokasi anggaran program dukungan manajemen sebesar 4,9 M sehingga untuk program dukungan manajemen berubah menjadi 126 M. Selanjutnya, penyesuaian anggaran program dukungan manajemen sebagaimana yang kami sampaikan tadi karena ada realokasi sebesar 4,9 M sudah kami buat, semula menjadi sebagaimana yang kami sampaikan dalam laporan kami. Kemudian, untuk Pagu Anggaran UPT Balai 2023, kami sampaikan di sana bahwa totalnya untuk program teknis sebesar 32 M, kemudian untuk program dukman 61,1 M sehingga totalnya adalah 93,2 M, sehingga untuk penyesuaian Alokasi Anggaran TA. 2023 sebagaimana yang kami sampaikan pada laporan kami di mana total Pagunya adalah satu koma tujuh delapan tujuh miliar sembilan, Rp1.787.913.120.000 yang meliputi semua unit kerja yaitu Sekretariat, Pusat-Pusat dan Balai-Balai.

Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ketua dan Anggota Komisi V.

Terima kasih.

WAssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Ibu Ka Badan. Selanjutnya, kami persilakan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Silakan, Pak.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DESA PDTT KEMENDES PDTT RI (Dr. IVANOVICH AGUSTA, S.P., M.Si.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi V serta para Anggota Komisi V yang terhormat,

Kami sampaikan di, mengenai anggaran dan pemanfaatannya di Tahun 2022 untuk BPI serta perencanaan di 2023. Di *slide* 8 di sana terbaca bahwa semula Pagu Anggaran BPI pada tahun ini adalah Rp99.248.182.000

kemudian setelah ada blokir kemudian menjadi Rp79.170.451.000, kemudian kalau dilihat dari realisasinya, sampai pada tanggal 31 Agustus 2022 telah terealisasi Rp51.168.947.000, jika dibandingkan dengan realisasi terhadap yang tidak diblokir maka mencapai 64,63%. Adapun, di persentase dengan Pagu semula itu mencapai 51,56%.

Di *slide* 9, terbaca bahwa masih ada deviasi kalau dibandingkan dengan Pagu semula sebesar 0,46%. Kemudian, untuk Anggaran 2023 di *slide* 19 terbaca bahwa semula total Pagu adalah Rp134.786.762.000 kemudian setelah rapat kerja yang terakhir di halaman 23.

Siap, Pak.

Total Pagu setelah Raker, menjadi Rp131.339.762.000 yang di sini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp88.129.762.000 dan PHLN Rp43.210.000.000. Adapun rencana target *output* prioritas di Tahun 2023 di *slide* 26, terbaca bahwa untuk Sekretariat dengan anggaran 49,2 Miliar direncanakan *output*-nya adalah layanan perencanaan dan penganggaran dua dokumen, layanan umum untuk 12 bulan, layanan pemantauan dan evaluasi untuk dua dokumen di *slide* 26, kemudian untuk pembinaan kepegawaian akan mencapai 301 orang, kemudian pengembangan pegawai 120 orang, layanan organisasi dan tata kelola internal, ini enam dokumen, gaji dan tunjangan PNS bagi 202 orang, untuk manajemen keuangan satu layanan satu BPI, untuk operasional dan pemeliharaan kantor selama 12 bulan, kearsipan untuk satu dokumen dan layanan hukum sebanyak lima dokumen.

Adapun untuk Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan anggaran 25,5 Miliar akan mencapai *output* pengembangan sistem informasi internal, ini ada beberapa sistem yang tercakup sebagai satu layanan. Dukungan layanan jaringan komunikasi data, ini juga ada beberapa kegiatan dalam satu layanan secara lebih jelas di *slide* ke-28. Kemudian, pengembangan sumber daya informasi, pengembangan teknologi informasi, pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, kemudian secara khusus layanan sapa desa, ini tim yang menyapa desa setiap hari, pengembangan kerja sama data dan informasi, berupa kerja sama berbagi pakai data lintas kementerian dan lembaga, kemudian pengelolaan data dan informasi untuk berbagai layanan data.

Di *slide* 28, untuk layanan data mencakup berbagai data seperti SDGs Desa, Indeks Desa Membangun yang digunakan untuk pengalokasian dana desa, Badan Usaha Milik Desa, Penggunaan Dana Desa kemudian berbagai aspek dari dana desa seperti *stunting* yang bersumber dari Dana Desa, data difabilitas dari Dana Desa dan kemudian APBD secara keseluruhan. Di *slide* 29, di sana terbaca bahwa jaringan komunikasi sebanyak Rp8 Miliar ini adalah dipakai untuk pemeliharaan berbagai layanan-layanan yang berkaitan dengan teknologi informasi seperti *bandwidth*, kemudian *email*, kemudian pemeliharaan pengamanan terhadap sistem informasi. Untuk layanan Sapa Desa ini untuk langganan telepon, kemudian untuk pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, ini untuk operasional dan pemeliharaan *data center*, kemudian *cloud server*, kemudian kegiatan di dalam *data center* itu sendiri.

Untuk jaringan komunikasi data, ini mencakup layanan *bandwidth* baik untuk yang *main* maupun *backup* dari *bandwidth*.

Di *slide* 30, untuk pusat pengembangan kebijakan ini mencakup berbagai kegiatan yang dimulai dengan *desk study* kemudian kajian lapangan dan kemudian penyusunan alternatif-alternatif kebijakan, ini mencakup bidang desa dan kawasan pedesaan, daerah tertentu, daerah tertinggal serta bidang transmigrasi. Kemudian, di *slide* 31 untuk pusat pengembangan daya saing, ini sebanyak Rp48 Miliar ini di dalamnya tercakup 43 Miliar lebih yang berasal dari PHLN untuk pengembangan Desa Cerdas, di dalamnya mencakup pengembangan kreativitas dan inovasi, ini rekomendasi kajian lapangan dan dokumentasi kebijakan. Untuk teknologi tepat guna, kemudian teknologi tinggi untuk pelaksanaan gelar TTG serta pengembangan teknologi digital.

Adapun anggaran lainnya adalah untuk pengembangan Desa Cerdas yang di dalamnya mencakup pengembangan ruang komunikasi digital, kemudian jejaring atau kerja sama Desa Cerdas kemudian untuk pengembangan kapasitas bagi 600 duta digital dan pengembangan kapasitas bagi 3.000 kader digital di level desa. Di *slide* 32, untuk penyusunan keterpaduan rencana pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi anggaran Rp5 Miliar akan digunakan untuk penyusunan rencana induk pembangunan desa, pedesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk jangka panjang 2025-2045. Kemudian, *background study* untuk peta jalan desa dan pedesaan untuk 5 tahun ke depan 2025-2029. Kemudian, *background study* untuk Peta Jalan Bumdes, kemudian *roadmap* untuk pendampingan Desa kemudian perubahan Permen Desa 5 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan, kemudian lokus untuk keterpaduan rencana pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi lima tahun ke depan, *review* rencana kawasan transmigrasi, advokasi untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, *background study* untuk Stranas daerah tertinggal, kemudian *background study* untuk *roadmap* kawasan transmigrasi.

Kiranya itu, Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota yang kami hormati yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Ka Badan.

Bapak-Ibu Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,

Demikian paparan dari para mitra kerja Komisi V, mulai dari Pak Sekjen, Pak Irjen, maupun Ibu Ka Badan dan Pak Ka Badan. Selanjutnya, kami akan masuk ke sesi pertanyaan dan pendalaman oleh Anggota Komisi. Untuk kesempatan pertama kita akan berikan kepada Bapak Muhammad Aras dari PPP, silakan Pak, Ayahanda silakan.

F- PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):

Ini Ananda yang baik, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan dan kawan-kawan Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Irjen, Pak Dirjen, Pak Kepala Badan dan Ibu Kepala
Badan, dan
Seluruh jajaran yang saya hormati,**

Pertama-tama tentu sebagai mitra yang baik pasti kami mengapresiasi capaian yang cukup luar biasa yang sampai hari ini bulan Agustus, mudah-mudahan capaian ini bisa lebih baik dari tahun kemarin Pak, karena ini empat Eselon I ini kan rata-rata belanja rutin Pak, jadi mudah-mudahan ini tidak ada kendala dalam hal serapan anggaran untuk capaian Tahun 2022, *insya Allah*.

Yang kedua, tentu saya tidak merinci per dirjen dan badan tetapi yang pasti bahwa di Tahun 2023 adalah tahun politik tahun yang sangat sibuk dalam hal menghadapi Pemilu 2024. Olehnya itu, kami hanya berharap bahwa mitra kami Komisi V betul-betul bisa membangun sinergitas dengan kami di seluruh Dapil yang ada, sehingga tentu kemitraan ini terlihat dari program-program yang dikeluarkan oleh Kemendes sehingga kami tentu tidak segan-segan juga mengatakan bahwa Kementerian Desa itu merupakan mitra kami yang baik dan mampu untuk membangun komunikasi dalam hal mampu sama-sama mendekatkan diri kita kepada seluruh lapisan masyarakat. Target kita tentunya adalah bagaimana memaksimalkan potensi daerah, bagaimana memaksimalkan potensi komunikasi untuk bisa menjalin *chemistry* sehingga keberadaan Kementerian Desa, keberadaan teman-teman Anggota Komisi V betul-betul diterima baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

Yang kedua, ya, mudah-mudahan program-program yang telah disusun oleh Kementerian Desa betul-betul membumi, tidak hanya sekedar apa namanya, penumpang lewat di programnya tetapi betul-betul membawa kesan di masyarakat sehingga bisa dikenang di masa-masa yang datang bahkan bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita, bahkan bisa memberikan nilai positif bahkan hari ini dikatakan bahwa membangun dimulai dari desa. *Nah*, kita berharap bahwa Kementerian Desa hadir untuk memberikan manfaat itu kepada seluruh desa sehingga kita semua akan merasakan manfaatnya.

Begitu saja Pak Ketua, barangkali yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Aras. Singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya Pak Tamanuri. Silakan Bang. Siap-siap, Pak Suryadi.

F- P. NASDEM (Drs. H.TAMANURI, M.M.):

Terima kasih, Pak Ketua.

**Anggota Dewan yang kami hormati,
Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Kepala Badan serta jajaran yang sudah hadir.
Ibu Kepala Badan ya, Kepala Badan,**

Saya langsung saja, dari apa yang sudah dipaparkan oleh empat (suara kurang jelas) tadi, saya sangat mengapresiasi, kenapa, karena dengan dana yang sedemikian kecil Bapak-Bapak bisa menata sedemikian rupa sehingga bisa mencakup keseluruhan hal-hal yang sangat penting untuk meningkatkan desa tertinggal kita ini. Yang pertama-tama adalah yang sangat fokus adalah saya mengharapkan peningkatan dari sumber daya manusia yang ada di pedesaan itu, karena kita ketahui bahwa secara umum personil yang ada tingkat pedesaan itu baik pengalaman ataupun pengetahuannya itu sangat terbatas. Oleh karena itu, itu merupakan tugas dari kementerian kita untuk dapat membina sedemikian rupa mereka, sehingga mereka tidak melenceng kiri dan kanan sehingga bisa bekerja sebagaimana aturan dan juga bisa melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, pembantuan daripada pemerintah pusat ini termasuk tentunya khususnya kementerian apa itu, Kementerian Desa Tertinggal.

Kedua, saya mengharapkan peningkatan pengawasan Pak, peningkatan pengawasan sedini mungkin sehingga aparatur kita yang ada di tingkat terdepan itu bisa secara dini tidak terbawa arus melihat kiri dan kanan sehingga mereka bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya ini tentunya, karena walaupun sedikit-sedikit yang dikelola di bawah itu mengenai dana desa dan lain sebagainya itu ada sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada mereka, termasuk juga kepada Kementerian Desa tertinggal.

Kemudian, harapan saya adalah fokus daripada pembinaan kita dan pembangunan kita ini adalah di desa-desa transmigrasi, kenapa? Karena desa transmigrasi itu adalah desa yang kita buat ya, orang-orang yang di tempat yang padat kita bawa ke daerah-daerah yang masih mempunyai luas lahan kemudian kita bina sedemikian rupa, jangan sampai di sini bahwa desa-desa transmigrasi itu terbelakang dari desa-desa yang ada di lingkungannya, bahkan kalau kita harapkan bahwa desa transmigrasi itu bisa menjadi contoh desa-desa yang secara tradisional, baik di dalam pengelolaan administrasi pemerintahannya ataupun cara-cara pola pikir mereka. *Nah*, ini yang kita harapkan karena apa, karena ini adalah desa bentukan kita dan memang kita yang bentuk jangan sampai mereka merasa kecewa karena lahan-lahan mereka tidak bisa mereka miliki secara penuh, lahan-lahan mereka tidak bisa dikerjakan karena masih diakui oleh orang-orang yang ada di sekitar situ, orang-orang dari desa-desa tua yang ada di situ. *Nah*, ini, ini harapan saya adalah yang harus kita lakukan supaya desa transmigrasi ini tetap berjalan sebagaimana harapan kita semua.

Saya rasa demikian tidak lebih tidak kurang. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Tamanuri. Selanjutnya kami persilakan ke Pak Suryadi Jaya Purnama dan siap-siap, Pak Irmawan.

F- PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):

Baik terima kasih, Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Rekan-rekan Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Sekjen, Pak Irjen, Kepala BPSDM, dan BPI serta seluruh jajaran,**

Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada rapat kali ini. Yang pertama saya ingin memulai dari Permendes Nomor 3 Tahun 2022, Pak Sekjen, tentang Petunjuk Operasional Kegiatan DAK Transportasi Pedesaan. Dalam Permendes PDTT ini, saya tidak melihat dicantumkannya dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Jalan, karena nanti ini akan mengatur tentang jalan di desa. Saya kira Permendes ini perlu direvisi menyesuaikan dengan undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang jalan, ya. Ini penting karena ada beberapa perubahan dalam kebijakan kita pengelolaan jalan desa, ya misalnya di situ disebut jalan desa strategis ya itu di undang-undang itu tidak dikenal istilah jalan desa strategis, ya intinya ini perlu ditinjau kembali Pak Sekjen, supaya sinkron antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain termasuk pengelolaan DAK Jalan.

Berikutnya, sekalian dengan Permendes PDTT ini juga barangkali perlu ditinjau seluruh petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dari semua program yang ada di Kementerian Desa PDTT, ya, karena dalam pengalaman kita beberapa program yang ada di daerah-daerah, di desa-desa itu sering pekerjaan birokrasinya itu jauh lebih panjang daripada kegiatan fisiknya, sehingga ini perlu disederhanakan. Misalnya desa wisata, itu realisasi pelaksanaan fisiknya paling 2-3 bulan selesai tetapi persiapan administrasinya sampai 6 bulan Pak, ya, karena harus ada rekomendasi ini, tanda tangan ini dan seterusnya. *Nah*, maksud saya petunjuk teknis ini jangan membuat Kementerian Desa atau pihak lain itu menjadi sulit dalam pelaksanaan karena kalau dalam pemeriksaan juga kita menjadi rumit ketika aturannya rumit begitu, tapi kalau aturannya kita sederhakan maka nanti pertanggungjawabannya menjadi lebih sederhana yang penting nanti hal-hal yang mendasar saja yang kita atur, tapi aspek-aspek birokrasi administrasinya ini bisa disederhanakan supaya kita tidak capek di urusan birokrasinya, *gitu*.

Jadi, ini menurut saya beberapa program yang ada di Kementerian Desa dan PDT ini, perlu ditinjau juklak dan juknis-nya ya, salah satu contoh misalnya kita ini kan mengelola APBN ya, sebisa mungkin sepenuhnya ini dikendalikan oleh pemerintah pusat ya itu, APBD dikelola pemerintah daerah ya termasuk

program-program di desa ya, kepala desa atau pemerintah desa itu juga representasi pemerintah, ya, sehingga nanti ada di provinsi ada di kabupaten ada di desa, padahal programnya cuma sedikit tapi birokrasi yang banyak jadi ini catatan saja Pak Sekjen supaya dievaluasi.

Selanjutnya, saya ke Pak Irjen. Saya menyoroti tadi sedikitnya aduan yang ditindaklanjuti. Ya, saya memahami barangkali karena anggaran operasional yang terbatas tetapi paling tidak begini, Irjen ini kan APIP, ya, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang tujuannya tentu tidak bermaksud nanti ujungnya ke ranah hukum tapi lebih kepada pembinaan, begitu ada aduan dari masyarakat sebaiknya ditindaklanjuti dalam bentuk pembinaan karena kalau ini tidak ditindaklanjuti nanti yang mengadu itu akan mengadunya ke APH, kalau sudah masuk APH masalahnya belum jelas, baru indikasi, tapi sudah rumit urusannya sehingga Pemerintah desa itu menjadi terganggu programnya jadi molor bahkan tidaknya hanya program yang diadakan, program yang lain menjadi, apa, terhambat karena gangguan-gangguan yang barangkali bisa dihindari kalau Pak Irjen ini bisa lebih aktif di dalam melakukan pembinaan.

Kita berharap seluruh aduan ini bisa ditindaklanjuti dan solusinya adalah pembinaan, jangan sampai mengarah kepada APH ya, walaupun mungkin pada batas tertentu saya kira tidak masalah dilanjutkan ke APH, ya, tetapi kadang-kadang baru indikasi atau baru hal-hal yang sebenarnya bukan masalah hukum akhirnya pembangunan di desa itu tidak kondusif. Kasihan program kita anggarannya sedikit tetapi karena gangguan-gangguan yang sebenarnya tidak perlu ini bisa kita hindari. Ini mungkin catatan saya Pak Irjen supaya apa namanya, aduan ini bisa ditingkatkan yang ditindaklanjuti, tadi saya melihat capaian tindak lanjutnya sangat sedikit, mungkin bisa dengan menugaskan APIP di daerah Aparat Pengawas Internal Pemerintah di daerah ya, supaya, tapi dengan arahan ini bukan untuk, harus ketangkap ini, tidak *gitu*, tapi harus diperbaiki kan tujuannya itu.

Berikutnya ini terkait dengan BPSDM ya, menurut saya *problem* kita di desa ini kan masalah SDM, saya kira kita setuju sehingga perlu ada pendamping. Oleh karena itu, mungkin ada saran atau dari Komisi secara khusus untuk meningkatkan anggaran di Kementerian Desa dan PDTT ini supaya misalnya memperbanyak program-program pelatihan, ya, karena masalah kita di seluruh desa ini *problem*-nya di SDM, kalau SDM ini sudah bagus saya kira beberapa kendala kendala tadi bisa kita hilangkan ya, sehingga pelatihan-pelatihan pembekalan ini perlu diperbanyak ya, Pak Ketua.

Dan, saya usul nanti dalam Raker, supaya ada rekomendasi khusus untuk menaikkan anggaran Kementerian Desa, ya anggarannya hanya 1 koma, yang 1,9 Triliun yang, di, yang digunakan untuk kegiatan, padahal kalau di Kementerian PU ini mitra kita juga. Saya contohkan tahun ini ya, anggaran untuk merenovasi Taman Mini Indonesia Indah itu 900 Miliar, Pak, ini kan sebenarnya sama satu titik kegiatan sama dengan satu kementerian kegiatannya. Kemudian, merenovasi taman-taman dalam rangka menyambut kegiatan G20 itu juga 1 Triliun lebih, Pak, ini yang menurut saya 70.000 desa di bawah Kementerian Desa ini, tetapi anggarannya tidak sampai 2 Triliun yang

dikelola ya, walaupun anggarannya 2 Triliun lebih, itu lebih dana pendamping desa.

Mungkin itu Pak Ketua, Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa direspon oleh pimpinan DPR dan juga secara khusus kepada Kementerian Desa dan PDTT. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Suryadi, memang Pak Suryadi cerdas, Pak, luar biasa semuanya saya setuju Pak, tadi apa yang Bapak sampaikan terutama Undang-Undang Jalan ya, memang butuh penyesuaian Pak Sekjen, karena hasil keputusannya kita bahwa APBN kita nanti akan mampu akan masuk ke sampai ke tingkatan kabupaten desa itu untuk intervensi pekerjaan-pekerjaan jalan. Selanjutnya kami persilakan, ke Pak Irmawan *nggak* hadir, *eh* setelah Pak Irmawan Pak Fadholi, ya.

F- PKB (H. IRMAWAN, S.Sos., M.M.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang kami hormati Pimpinan, Bapak-Ibu para pejabat Eselon I dari Kementerian Desa,

Saya singkat saja *nih* Pak Sekjen, langsung saja Pak Sekjen barangkali terkait dengan adanya kegiatan yang di Tahun 2022 ini yang masih diblokir statusnya atau dibintang, sementara laporan yang kami dapatkan dari daerah-daerah yang dibintang ini bukan hanya kegiatan yang sifatnya pelatihan, ternyata kegiatan fisik juga ada Pak, sementara kan saat ini kita sudah memasuki bulan 9, bulan September, sisa Tahun Anggaran ini tinggal 3 bulan lagi, kira-kira apakah memang kegiatan yang diblokir ini masih memungkinkan untuk dapat dilaksanakan di Tahun Anggaran ini dan kira-kira kapan dibuka blokirnya Pak, atau barangkali ya tidak mungkin dilanjutkan mungkin dilanjutkan ke Tahun 2023 untuk dapat dilanjutkan.

Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, mohon penjelasannya, Pak Sekjen. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Irmawan. Singkat, padat, jelas. Silakan Pak Fadholi. Siap-siap, Pak Mesakh Mirin.

F- P NASDEM (Drs. FADHOLI, M.Ikom):

Terima kasih.

Yang saya sampaikan terima kasih kepada Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi V dan Pak Sekjen dan juga Pak Dirjen.

Yang pertama saya nanti habis bicara memang saya mau pamit karena ada rapat MKD, sehingga bukan meninggalkan tempat tetapi karena ada rapat MKD, untuk ada pengaduan yang harus ditangani pada hari ini.

Yang pertama, tentu saya memberikan apresiasi kepada Menteri Desa ini, cuma sayangnya kurangnya itu memang hal yang perlu dibenahi adalah ada satu kekurangan yang vital itu kurang dana saja, Pak, jadi itu, jadi karena ini harapannya juga besar. *Nah*, oleh karena itu, bisa *nggak* dari Kementerian Desa membuat perencanaan yang, yang memang betul-betul bisa memerlukan, ini persoalan dana kecil ya alokasi kecil ini apakah programnya yang kurang atau memang ini hanya *given gitu*, kalau ini hanya masalah *given* kan sudah *nggak* bisa digoyang-goyang kan itu. Tetapi, kalau memang ini karena perencanaan dan programnya atau *blueprint* ke depannya itu yang perlu dibuat besar mungkin saya usul ini perlu ada FGD, perlu ada FGD dengan Kementerian Desa ini, untuk bisa membuat program ke depan yang lebih besar sehingga paling tidak ketika kemudian mengusulkan anggaran ini ada alasan yang kuat bahwa ini adalah merupakan satu program yang sudah direncanakan itu, jangan sampai, ini kalau kami kan belum tahu *blueprint* jadi perencanaan ke depan, lima tahun ke depan apa yang akan dilakukan oleh Menteri Desa ini, dengan demikian kan mungkin akan bisa mendukung apa penambahan dana ini. Atas kinerjanya, saya memberikan satu apresiasi.

Dan yang kedua, catatannya sederhana saja Pak, untuk para pendamping ini untuk bisa lebih proaktif, karena ini kemarin juga ada beberapa pendamping yang mungkin kurang proaktif, itu saja. Jadi, ini bisa agar semua pendamping yang ada itu bisa koordinasi dengan seluruh Anggota Komisi V yang ada di Dapilnya masing-masing sehingga mereka biar tahu gitu Pak, sehingga ada koordinasi karena kita ketika kemudian akan ada serapan aspirasi dan lain sebagainya tentu mungkin melalui pendamping yang ada di masing-masing wilayah ini bisa kita komunikasikan, bisa bersama-sama. *Nah*, ini seakan-akan bahwa pendamping ini kan sangat eksklusif *gitu loh* sehingga mungkin saya tidak tahu apakah ini di Dapil lain juga semacam itu tetapi ada di Dapil saya ini kelihatannya kan kurang proaktif maka akan lebih bagus kalau pendamping itu bisa ada komunikasi kepada seluruh Anggota Komisi V yang ada di Dapilnya masing-masing. Ini menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa melakukan koordinasi itu.

Dua hal itu yang saya sampaikan yang lainnya saya makmum dan tentu saya akan menyepakati apa yang nanti akan diputuskan di rapat ini dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua yang sangat baik hati ini.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Fadholi. Selanjutnya, Pak Mesakh Mirin, kita langkahkan beliau *nggak* hadir, Pak Irwan juga *nggak* hadir, *nggak* ada di tempat sekarang. Pak Eddy Santana, terakhir Pak Hamka.

F- P GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang hadir baik fisik maupun virtual,
Para pejabat Eselon I dari Kementerian Desa, Sekjen, Irjen, dan Kepala Badan beserta jajaran,**

Saya langsung saja jadi mungkin, ini hanya pemikiran ke depan jadi saya kan melihat Kementerian Desa itu, nomenklatur itu, artinya begini keinginan kami, keinginan saya pribadi, Kementerian Desa itu bisa masuk gitu semua kegiatan di desa. Tadi disampaikan Pak Suryadi, bagaimana ini ke depan apakah ada perubahan undang-undangnya, itu bersentuhan urusan jalan ya, bahwa ini urusan PUPR, karena kita di Undang-Undang Jalan Nomor 2 itu, merevisi Undang-Undang Jalan itu dikelompokkan jalan desa dikelompokkan jalan kabupaten nanti itu, *nah*, bagaimana dan Kementrian Desa, bisa *nggak* menyentuh itu di luar itu. Nanti kan ada Inpres Jalan, *nah* seperti itu tapi ini *nggak* cukup.

Menurut saya Kementerian Desa itu dari Kementerian yang koordinatif sifatnya harusnya menjadi kementerian teknis juga sehingga anggaran juga harusnya ditambah jangan cuman ngurusin pendamping gitu kan habis uangnya karena itu koordinatif. Jadi, kalau 25% untuk pendamping dan 75% untuk program itu lebih bagus ke depan tapi harus ditambah besarnya gitu Pagu Anggaran. Kalau sekarang di 3 Pak ya? 3 Triliun, masa kita begini gini saja, pendapatan kita mungkin ke depan lebih bagus, ekonomi lebih baik mungkin bisa di 10 Triliun gitu kan, baru kita bisa membangun desa *tuh* benar-benar itu jalan desanya, jembatan desanya, irigasi desanya dan keluhan banyak kepala desa ini kan dari mana dia, semua *nggak* boleh. Membangun kantor desa *gitu*, Balai desa misalnya seperti itu. Kalau ke depan boleh kan lebih leluasa lagi, *nah*, desa-desa kita lebih bisa lebih bagus itu.

Nah, inilah yang yang mungkin jadi pertanyaan saya terus itu kenapa kita tidak bisa dari Anggaran Kementerian Desa itu mewujudkan suatu desa yang betul-betul ya kan, sekarang oke lah namanya *oh* ini ada contoh desa sudah jadi Desa tertinggal jadi desa Mandiri, tapi seperti apa. Tempat saya itu KTM saja belum beres Pak, Kota Terpadu Mandiri ya itu kan di desa. Kemarin, bulan kemarin, saya kunjungi masih amburadul juga infrastrukturnya mereka ramai-ramai juga minta ini, minta itu, gitu kan, kumpulah beberapa kepala desa.

Yang saya pikir gimana caranya ini kalau kita mintakan di Kementerian Desa gitu kan, sangat terbatas anggarannya *nggak, nggak* mungkin bisa kita penuhi.

Nah, itu Pak, keinginan saya ke depan gitu, kita benar-benar habis-habisan urusin desa itu, gimana caranya kalau aturan harus dirubah ya kita rubah, undang-undang direvisi, kita revisi itu, atau ada turunan undang-undang di bawahnya ya kita pakai itu, jadi desa itu setiap tahun ada sekian puluh desa di satu kabupaten jadi desa yang benar-benar bagus *gitu* baik infrastrukturnya yang akhirnya kesejahteraan masyarakatnya bisa kita tingkatkan *gitu*, yang pasti itu.

Jadi, kalau sekarang ini hasil panennya bagus tapi ngangkutnya susah gitu kan, karena jalan produksinya jalan pertaniannya kurang bagus itu kan, kalau malam gelap itu padahal sekarang desa itu gampang saja *nerangkan* dengan *solar cell* itu kan, lampu penerangan itu sudah bisa hidup itu sudah bisa terang, sudah bisa, setidaknya-setidaknya di tempat pemukiman konsentrasi penduduk itu di perkantoran desa dan sebagainya itu sudah harus pelayanan masyarakat desa itu semuanya infrastruktur baik.

Saya kira ini, Pak, jadi ini pemikiran saja mungkin ke depan kita sama-sama, jadikan Kementerian Desa ini lebih lebih hebat lagi gitu untuk *ngurusin* desa.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Eddy Santana. Selanjutnya yang terakhir Pak Hamka B. Kady, silakan senior.

F- P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):

Terima kasih, Pimpinan.

*Bissmilahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Pak Sekjen, Ibu Dirjen, dan Kepala BPSDM dan Dirjen Informasi Desa,**

Saya tidak banyak yang ingin saya dalam, sedikit di sini ke Pak Sekjen mengenai DAK itu tadi yang dipaparkan di sini. Apakah yang menjadi syarat mutlak dari pengalokasian DAK dari sisi pandangan Kementerian Desa, sebab menyangkut DAK ini PUPR juga terlibat Pak, dalam hal teknis. Yang saya ingin tanyakan adalah dari sisi Kementerian Desa walaupun di sini sudah digambarkan, ya, tetapi saya ada sedikit yang saya tanyakan di sini disebut DAK Transportasi Pedesaan. Modelnya seperti apa *sih* itu di dalam persyaratan transportasi pedesaan yang Bapak berikan kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan, kalau dari sisi Kementerian PUPR otomatis jalan, bendungan dan sebagainya dan sebagainya, ya. *Nah*, dari sini kira-kira seperti

apa yang Bapak sampaikan itu menyangkut transportasi pedesaan, apanya yang apakah jenis transportasinya? Ataukah dari sisi mana, ini ini penting karena yang menjadi persoalan di sini adalah DAK afirmasi nanti, ya, karena di dalam penyusunan anggaran itu DAK afirmasi itu masuk juga dalam ketentuan-ketentuan yang diberikan kepada kepala desa, desa mana yang masuk di dalam daerah-daerah tertinggal, afirmasi-afirmasi yang penting dilakukan oleh desa itu. Itu kira-kira, Pak Sekjen.

Kemudian yang kedua BPSDM ya, ada di sini pelatihan calon transmigrasi empat angkatan, pelatihan desa wisata tujuh angkatan, dan pelatihan pengelolaan Bumdes 13 angkatan. Ini menarik saya pikir tidak cukup kalau cuma sekian kali melakukan pelatihan khususnya dari sisi Bumdes, harus ada evaluasi dan sekaligus pendidikan terhadap pengelola Bumdes itu, apalagi ada Bumdesma. *Nah*, kalau hanya seperti ini 13 angkatan cukup *nggak* seluruh Indonesia seperti itu, karena jujur saya katakan bahwa Bumdes ini perlu kita matangkan konsepnya, ya, supaya lebih berdaya guna dan manfaat banyak di desa itu sendiri. *Nah*, oleh karena itu, rasa-rasanya kalau pelatihan-pelatihan seperti 13 angkatan Bumdes misalnya, satu kali angkatan itu berapa Bu, dan kriteria Bumdes itu yang akan dilatih apanya? 30? Kalau di sini pengelolaan 13 angkatan, satu angkatan 30?

KETUA RAPAT:

Nanti saja dijawab Bu, nanti saja.

F- P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Itu yang ingin saya sampaikan kepada kedua Sekjen dan BPSDM. Saya kira itu saja, pimpinan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Hamka, ini ternyata muncul Bapak ini. Pak Mesakh Mirin silakan, Pak. Bapak juga mau?

F- PAN (MESAKH MIRIN, SKM):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan dan semua Anggota DPR RI Komisi V,
Yang saya hormati mitra kita Kementerian PDT, Pak Sekjen, dan
jajarannya yang kami hormati pula,**

Berkaitan dengan dana desa ini sudah disampaikan tadi. Salah saya agak terlambat sedikit Pimpinan jadi mohon maaf, ya. Tapi setelah saya lihat Presentasi Pengaduan Tahun 2022 ini, *kok* di Papua itu hanya cuma dua sedangkan korupsi besar-besaran itu di Papua *loh* ya, korupsi besar-besaran dana desa itu di Papua, Pak, tapi seolah-olah pemerintah itu kayak tutup mata “silakan *you* korupsi tapi jangan asal merdeka”. Metode kayak gini yang tidak benar. Kalau melakukan semua peraturan perundang-undangan di seluruh Indonesia, wajib dilakukan termasuk di Papua nya, Pak.

Baik terima kasih saya lanjut, Pak Ketua, ini ada masalah besar juga di Papua, dana desa, kebetulan saya di Yahukimo Pak, itu ada sekitar 518 desa Pak, di sana di Kabupaten Yahukimo itu 518 desa, Pak, Pak Sekjen. Mungkin tahun lalu ada persoalan besar yang dilakukan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu memberikan kewenangan kepada kepala desa dia sebagai pengguna anggaran untuk dana desa ini. Tapi sampai sekarang itu khusus untuk di Papua itu ada kepentingan-kepentingan sehingga undang-undang ini ditabrak, *nah*, ini yang saya lihat dibiarkan.

Contoh di Yahukimo itu sampai hari ini realisasi dana desa itu hanya dibagi-bagi di pinggir jalan, sedangkan ada mekanisme-mekanisme dan peraturan-peraturan ini berlaku untuk semua rakyat Indonesia termasuk di Papua, SPP-nya belum diambil, dananya dibagi. *Nah*, ini yang kita beberapa waktu lalu tahun lalu yang mungkin Pak Sekjen dengar informasi persoalan ini juga, pernah kita bicarakan di sini ya tapi sampai hari ini belum tuntas, tapi ini korupsinya besar, itu jumlah desanya besar uangnya besar pula.

Nah, ini *nah*, coba ini evaluasi total antara Kementerian PDT dengan Menteri Dalam Negeri agar supaya pemerintahan ini benar jalan. Jadi konsisten konsekuensi untuk peraturan perundang-undangan seperti ini betul-betul diterapkan. Jangan hanya di Indonesia lain boleh dijalankan, tapi di Papua tidak, lah ini *nggak* bener *nih*. *Nah*, seperti begini metode pemerintahan begini pasti orang Papua marah. Coba implementasinya benar peraturannya, evaluasi betul dilakukan, korupsi merajalela di sana tidak ada laporan pertanggungjawaban tapi oke jalan. *Nah*, ini *nggak* benar.

Tadi di Yahukimo itu, Peraturan Bupati begitu diganti padahal peraturan itu kan masih lama begitu dia kemauannya diganti boleh jalan, anggarannya jalan, mana bisa begitu? *Nggak* boleh peraturan begini membuat masyarakatnya jadi korban Pak, coba evaluasi total nih. Ini sampai hari ini mereka sudah menang di Pengadilan Tinggi Jayapura, agar supaya kembalikan ke beberapa SK yang dari Bupati lama, tapi dananya dibagi, SPP nya belum diambil langsung dananya jalan, ini peraturan dari mana, ini *nggak* benar *nih*, ini evaluasi total untuk khusus untuk 518 desa di Kabupaten Yahukimo saya kira evaluasi untuk Tahun 2022 ini.

Dan, 2023 jangan anggaran diturunkan lagi, tidak boleh, saya atas nama rakyat Papua khusus rakyat Yahukimo, tidak boleh lagi masyarakat kita jadi apa namanya, jadi subjek pembangunan tapi realisasinya hanya tidak dilakukan dengan benar, ini *nggak* boleh. Coba Pak Sekjen dan jajarannya cek *crosscheck* untuk benar tidak ini, sampai sekarang bisa jadi potensi hukum.

Hari ini teman-teman di sana sudah 518 desa itu, sudah pengajuan di pengadilan mereka sudah menang tapi bupatinya bagi di jalan, *nggak* boleh itu. Coba evaluasi yang benar *nih*, Pak Sekjen ya, khusus untuk Kabupaten Yahukimo.

Mungkin itu saja yang saya bisa dapat sampaikan lebih lanjutnya saya mohon maaf Pak Sekjen tapi coba evaluasi benar antara Kementerian PDT kita dengan Kementerian Dalam Negeri, karena ini sudah lama ya, Pak, coba cek lagi, setahun lalu kita akan bicarakan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan tapi dalam laporan Bapak ini, hanya pengaduan di Papua itu hanya cuma dua, di mana itu dua nya? Coba jelaskan juga *dong*. Papua secara keseluruhan itu korupsinya besar-besaran, Pak Ketua, semua korupsi habis itu, tapi mana ada pemerintah mau tegakkan, tidak ada yang ditegakkan. Coba evaluasi benar supaya pemerintah ini jalan yang benar.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Adek. Ini, oh *nggak* ada, *nggak* ada, aduannya *nggak* ada? Ini aduan langsung Pak Irjen dari Anggota DPR RI Komisi V *nih*. Pak Sumail mau? Mau bertanya? Ya, karena nama Bapak *nggak* terdaftar di sini, ya, kalau karena Kapoksi bolehlah, Pak silakan.

F- P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan yang baik hati dan bijaksana,
Anggota yang saya hormati dan mitra kerja Komisi V Kementerian Desa,
Pak Sekjen, Pak Irjen, Kepala Badan,**

Catatan saya tentang apa namanya terhadap Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia kaitannya dengan keberadaan pendamping, Pak, Ibu. Beberapa hal memang masih saya mendengar ini keluhan-keluhan ini di daerah Jawa, Jawa Timur, tentu juga di beberapa tempat, bahwa keberadaan pendamping bukan hanya secara fisik tidak hadir, tetapi kaitannya dengan kapasitas yang ada di dalam diri ini.

Saya mendengar juga bahwa beberapa pelatihan, beberapa bimbingan yang dilakukan terhadap pendamping sudah seringkali dilakukan, *nah* tentu perlu sebuah evaluasi. Apabila pendamping-pendamping itu tidak *qualified* untuk mendampingi desa-desa yang ada, di bawah naungan mereka-mereka di tentu harus dengan secara, secara maksud saya, secara apa namanya, secara nasional itu juga perlu dilakukan sebuah penggantian. Atau yang kedua, opsinya adalah karena kita sudah lakukan pendampingan sudah sekian tahun

Pak, catatan saya sudah lebih dari lima tahun sementara di desa dan pedesaan itu ada beberapa entitas, ada beberapa kelembagaan yang juga masuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dari badan apa namanya pengawas keuangan, BPK, BPKP, *nah* tentu semuanya ini ingin memberikan peningkatan kapasitas terhadap aparatur desa.

Nah, dari beberapa *stakeholder* itu adakah semacam *skoring* Pak, terhadap apa namanya peningkatan kapasitas Kepala Desa, sehingga itu menjadi sebuah formula kebijakan. Beberapa instansi sudah masuk, ada tidak ukurannya bahwa memang betul ada peningkatan terhadap kapasitas aparatur desa yang ada di sana, selain pendamping desa yang ada yang *diintrodusir* oleh Kementerian Desa. Kalau memang itu berdampak secara otomatis Pak, untuk mengurangi beban biaya rutin kita, maka secara bertahap pendamping-pendamping desa, mungkin yang di tingkat kecamatan kita sudah mulai kurangi atau mungkin dari lima desa hanya ada satu, sehingga anggaran dana itu bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan strategis pemberdayaan yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat desa yang ada di sana.

Berikutnya, Pak, yang ketigalah kalau saya hitung, bahwa banyak sekali, kalau kita melihat bahwa bagaimana Undang-Undang Desa ini lahir, Nomor 6 2014 itu, mengakui bahwa ada keberagaman ada kebhinekaan di desa di seluruh Indonesia yang kurang lebih 78 ribu. Akan tetapi, bahwa banyak program-program titipan, otonomi desa yang diharapkan itu, tidak tercapai Dana Desa ataupun apa DD, ADD ya, yang dari kabupaten itu hanya namanya saja tapi banyak program-program titipan sehingga kepala desa yang sudah melakukan perencanaan melalui Musrembangdes itu, tidak bisa diaplikasikan karena banyaknya titipan-titipan program yang dari pusat, tetap *top down* ini, ini saya kira, perlu kita apa namanya rubah hal-hal seperti ini sehingga betul-betul memberikan desa kesempatan yang seluas-luasnya untuk membangun dirinya.

Demikian, Pimpinan. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Sumail. Hari ini kelihatan ganteng, ceria, dengan jas barunya, kalau pakai jas keren, Pak. Dari Anggota selesai.

F- P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Pak Ketua, dari saya ada sedikit.

KETUA RAPAT:

Oh ya Kakak, silakan Kakak.

F- P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Baik.

**Pak Ketua dan rekan-rekan Anggota V,
Pak Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM, Kepala BPID, serta seluruh jajarannya
yang kami hormati,**

Pertama, dari kami memberikan apresiasi atas capaian kinerja sejak 2021-2022 ini, bisa berlangsung dengan baik karena atas koordinasi di tingkat kesekjenan dan juga kepala-kepala badan di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yang baik sehingga ini dapat berlangsung dengan baik dan memberikan dampak yang berarti bagi penyelenggaraan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa di seluruh wilayah nusantara.

Dan berikut, dari kami sedikit saja, semoga ini jadi catatan untuk BPID. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan pengembangan masyarakat desa saat ini, yang kami lihat adalah rendahnya data yang dimiliki oleh desa, selain itu, informasi terkait potensi yang ada di desa pun belum tersampaikan secara baik kepada publik. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kehadiran badan ini, dapat memberikan dampak yang berarti dalam rangka menjembatani, ya, kekurangan informasi yang ada di desa karena banyak potensi desa yang belum diakses dengan baik karena kekurangan data dan informasi. Oleh karena itu, perlu memanfaatkan anggaran yang ada di Tahun 2022-2023 ini, dalam pengembangan informasi masyarakat desa.

Sekian. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Kakak Willem. Dari Anggota, secara yang hadir secara fisik, sudah selesai selanjutnya kita akan beralih ke virtual ada satu penanya, silakan Pakde, Pakde Sudjadi. Belum di-*unmute* Pakde, suaranya masih belum kedengaran.

F- PDIP (Ir. SUDJADI):

Sudah?

KETUA RAPAT:

Sudah, ya, silakan-silakan.

F- PDIP (Ir. SUDJADI):

**Mas Wakil Ketua yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan yang
setiap harinya membawa rapat ini selalu sejuk.**

Ini dari *anu*, hati saya yang dalam jadi tidak basa-basi.

Bapak Sekjen, Pak Irjen dan para Kepala Badan,

Saya poin-poin saja Pak, karena kalau begini *tuh* katanya *center*-nya nanti di pusat perencanaan *panjenengan* di bawah Sekjen, jadi semuanya ke sana. Saya hanya usul, Bumdes itu *mbok* anggarannya dinaikkan Pak, masa dari 75 jadi 50. Untuk beli Peralite saja sudah sekarang naik, syukur bisa 100 kalau tidak bisa ya, kembalikan 75, jadi pantas *gitu loh*, 50 juta itu sekarang aduh *anu*, sipil.

Yang kedua, saya itu mempunyai desa yang semuanya pengusaha tahu. Tentang pembuangan air limbah tahu, sudah dibantu oleh Cipta Karya. Saya minta ini menjadi tugas Pak Sekjen, Pak Dirjen atau Kepala Badan apa, pelatihan manajemen tentang pemasaran tahu, di Muntilan. Yang kedua, saya punya satu desa hampir 100 dusun itu mempunyai kolam ikan. *Nah*, bisakah ini juga ada pendidikan pelatihan kepengusahaan di bidang ikan, syukur ada contoh bagaimana membuat Empang yang produktif, syukur lagi kalau ada pasar ikan. Mungkin ini terlalu *anu*, contoh saja Pak, contoh bagaimana membuat Empang yang kompetitif.

Terus kemudian tentang *stunting* Pak, *mbok* Kementerian Desa itu jangan hobi *ngotak-ngatik* dana desa. Kades itu sebetulnya kalau boleh *misuh-misuh loh*, Pak. Anggaran untuk ini, untuk ini, untuk apa, penyakit ini untuk penyakit ini. *Nah*, sekarang itu muncul tapi kata-kata *stunting*. Pernah nanya apa sih di desa itu, *stunting* itu? Kalau Kementerian PU jelas, Pak, syarat *stunting* itu desa bersih, ada sampah, desa kecukupan air, desa ada sanitasi, desa jalannya begini, begini, begini, begini. Itu salah satu daya dukung untuk bisa mengurangi *stunting*. Kalau Kemendes itu kalau hanya perintah dana *stunting* dari dana desa, atau *nggak* usah mikir saja bisa Pak, tolong agak kreatif. Saya agak keras ini. Kemendes agak kreatif. SK dari Presiden yang di usulan, usulan, *anu* usulan, usulan Kementerian Desa itu dulu terus kalau boleh kepala desa itu *misuh-misuh*, 30-40% untuk penanggulangan penyakit yang sekarang ini.

Jadi, tolong saya minta jangan sekali-kali anda berkata *stunting* tapi tidak mengeluarkan anggaran untuk desa, hanya perintah nanti dari dana desa. Itu *ndak* sekolah saja bisa Pak, perintah itu, jadi itu. Saya tidak tahu kepada Dirjen apa, kepada Dirjen apa, kepada Kepala Balai atau Kepala Badan apa, tapi yang penting saya pegang dari Pak Sekjen itu sebelum didistribusi itu semuanya diolah oleh perencanaan. Ini juga informasi bagi teman-teman, *nggak* usah ke dirjen-dirjen usulannya ke perencanaan saja, Pak. Jadi, Pak Dirjen juga saya minta ini konsisten, semua usulan dari Anggota Komisi V itu lewat badan perencanaan.

Saya kira itu, Pak, *anu* usul saya terutama *stunting* Pak. Kementerian Desa tapi tidak ada perannya *stunting* ya luculah, tapi kalau hanya perintah ini *stunting* diambilkan dari dana desa, mohon maaf ya, *nggak* sekolah saja bisa Pak. Sekian. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Pakde, terima kasih.

Bapak-Ibu Anggota Komisi V.

Semuanya sudah selesai, Pak. Mungkin saya sebelum menyerahkan kepada mitra untuk menjawab saya sedikit menambahkan beberapa hal. Yang pertama, untuk Pak Sekjen, saya juga ingin mempertanyakan, sepertinya pertanyaan sama *nih* Pak sama Pak Hamka. Dasar penentuan alokasi prioritas DAK Transfer Desa 2023. Saya melihatnya berdasarkan indeks keterjangkauan rendah dan daerah transmigrasi, sementara Sulawesi Selatan ini memang saya lihat sudah *nggak* ada lagi di situ, namun kemudian ada beberapa yang masuk wilayah transmigrasi dan mungkin juga desa yang keterjangkauannya rendah. Kalau ini berbasis Kabupaten, mungkin kami tidak akan mendapatkan lagi ini untuk DAK-DAK Transfer Desa ini, tetapi mungkin kalau berbasis desa kalau melihat secara karena tidak semua desa-desa yang ada di provinsi Sulawesi Selatan itu betul-betul sudah keluar dari pada daerah tertinggal, mungkin bisa dipertimbangkan Pak Sekjen, untuk itu.

Kemudian, untuk Ibu Ka Badan BPSDM, saya ingin penjelasan terkait rendahnya capaian realisasi program terkhusus di tenaga pendamping profesional, Bu. Tadi, targetnya sebesar 15 ribu orang tapi ternyata yang realisasi sampai dengan saat ini tadi Ibu sebutkan 129, tapi sebenarnya 979 orang. Ini agak jauh timpang ya, belum 10% nya, kemudian jadi kira-kira apa yang menjadi permasalahan termasuk untuk pelatihan masyarakat desa DTT, ini juga targetnya 4.143 orang, tapi yang baru terlaksana baru 1.621 orang, *nah* ini juga kemudian yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi permasalahan.

Kemudian, tadi beberapa Anggota, Pak Fadholi juga menyampaikan agar supaya pendamping-pendamping desa ini bisa diukur kinerjanya seperti apa, karena anggaran terbesar yang Ibu miliki ini, kalau bisa dipresentasikan itu 60% anggaran Kementerian Desa ada sama Ibu, walaupun lebih banyak teralokasikan untuk pendamping desa. Jadi, kurang lebih 60% ya 1,79 Triliun. Dan, kemudian saya selama menjadi DPR ini, juga berinteraksi dengan pendamping desa itu sangat-sangat minim, Bu, hanya sekali saja mungkin waktu kami Kunker di Balai Makassar itupun hanya koordinatornya bukan pendamping desanya. Kami ingin minimal pada saat kami reses itu juga para pendamping desa itu juga bisa ikut hadir di desa-desa tempat kami reses sekarang kami juga ini kadang-kadang *nginap* di desa-desa, Bu. Jadi, kalau bisa koordinator provinsi atau koordinator kabupaten pendamping desa ini harusnya lebih proaktif melakukan komunikasi dengan seluruh Anggota Komisi V, yang ada di setiap Dapil.

Kemudian, menyangkut masalah Pak Irjen, tadi saya mengapresiasi atas pencapaian opini WTP Bapak di Tahun 2021. Namun, seperti yang disampaikan teman-teman tadi bahwa kita menginginkan bahwa fungsi Irjen ini

adalah fungsi pembinaan, jadi, menjadi pagar buat kementerian Bapak jangan sampai kemudian kita tahu sama-sama bahwa tidak sedikit kepala-kepala desa kita ini yang bersentuhan dengan aparat hukum dan kemudian mungkin dengan adanya keluhan-keluhan bisa segera diantisipasi oleh Bapak dalam bentuk pembinaan. Jadi, seperti yang Pak Suryadi sampaikan tadi itu sangat betul Pak, fungsi Bapak di sini adalah melakukan pembinaan dan tentunya memberikan petunjuk agar supaya seluruh perangkat yang ada di Kementerian Desa PDT ini terhindar dari persoalan-persoalan hukum.

Kemudian, untuk Pak Kepala Badan, Pak Dr. Ivanov. Bapak ada keturunan Rusianya, Pak? *Nggak* ada ya? Namanya keren, Pak, Ivanovic Agusta. Program *Smart Village* atau Desa Cerdas, ini pada dasarnya kami terus terang setiap kali reses selalu berada di desa-desa yang berbatasan antar kabupaten satu dan komponen lain. Kendala utama mereka itu, untuk menjadi *smart* tentu informasi, ya, dalam hal ini mereka dalam mengakses informasi itu sangat terbatas karena utamanya jangankan jaringan internet Pak, *wong*, apa namanya, *signal*-nya saja belum menjangkau desa-desa tersebut. Jadi, kemungkinan kalau memungkinkan untuk membuat bahasa *smart* sebaiknya saya lebih cenderung bagaimana agar desa-desa yang terisolir ini baik dari sisi infrastruktur fisik jalannya, minimal tidak terisolir dari informasi lagi, minimal kemudian jangkauan internet ataupun apa itu untuk kemudian membuat program *Smart* Desa ini bisa optimal, setidaknya itu bisa menjadi prioritas buat Pak Ka Badan.

Mungkin itu saja yang dari kami. Selanjutnya, saya akan mempersilakan kepada mitra Komisi V, agar memberikan tanggapan dan jawaban atas pendalaman yang telah disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI. Apabila cukup panjang, mungkin bisa Bapak sampaikan secara tertulis, Pak Sekjen, tapi untuk *highlight*-nya saja beberapa pertanyaan-pertanyaan ini kami persilakan secara berturut-turut mulai dari Pak Sekjen untuk memberikan jawabannya.

Saya persilakan, Pak Sekjen.

SEKJEN KEMENDES PD TT RI (TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si.):

Baik, terima kasih.

**Pimpinan yang kami hormati,
Anggota yang kami hormati dan kami muliakan,**

Terima kasih atas respon dan tanggapan serta pendalaman yang disampaikan oleh Pimpinan dan seluruh Anggota. Seluruh masukan dan gagasan serta pendalaman yang menurut kami sangat relevan, berkaitan langsung dengan tugas yang kami emban dan kami sudah mencatat serta memperhatikan dengan sungguh-sungguh untuk bisa ditindaklanjuti sesuai dengan apa yang disampaikan. Yang pertama, kami menyampaikan penghormatan dan apresiasi ketika semua prihatin dengan anggaran di Kementerian Desa yang cukup kecil dan mudah-mudahan ada langkah-

langkah yang baik, yang bisa kita lakukan secara bersama untuk meningkatkan porsi anggaran kita di tahun-tahun yang akan datang.

Yang berikutnya, terkait dengan peningkatan SDM Desa dari Pak Tamanuri dan Bapak-Bapak Anggota yang lain akan sepakat untuk terus kita tingkatkan dan nanti akan ditambahkan secara detail oleh Kepala Badan Pengembangan SDM, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Kemudian, untuk Pak Suryadi kami setuju untuk ke, bisa ada peninjauan kembali misalnya untuk mengikuti atau mempedomani Undang-Undang Nomor 2/ 2022 tentang Jalan terkait dengan Permendesa Nomor 3 untuk petunjuk operasional, dana alokasi khusus afirmasi untuk transportasi pedesaan, terkait misalnya tadi di jalan strategis desa dan seterusnya. Kemudian, yang berikut Pak Sudjadi, terkait dengan penyederhanaan urusan administrasi atau birokrasi yang ikut mendukung program-program teknis, kami akan perbaiki, memperhatikan itu dan akan ada penyesuaian petunjuk teknis operasional terkait dengan program teknis sehingga tidak lebih rumit dibandingkan dengan program teknis itu sendiri. Terima kasih atas masukannya.

Kemudian, terkait dengan pengaduan dari daerah dan seterusnya nanti termasuk dari Yahukimo, Pak Mesakh, tadi sampaikan nanti ada Pak Irjen yang bisa menyampaikan karena mungkin saja laporannya hanya dua, padahal kami menunggu banyak laporan untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan atas aduan-aduan yang masuk ke Kementerian Desa.

Kemudian, yang lain yang menonjol kami kira untuk Pak Eddy Santana terkait dengan program di bidang transmigrasi tadi kami betul sekali ada RDP juga dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, ini juga menjadi titik perhatian kami untuk tidak hanya KTM tapi menjadi transpolitan konsep baru Pak Menteri sekarang ini, itu juga perlu apa namanya program-program yang lebih fokus, kami menyambut dengan gagasan yang sangat baik dari Pak Eddy Santana.

Kemudian, untuk Pak Hamka dan Pak Pimpinan sendiri, berkaitan dengan dasar penentuan DAK Afirmasi Transportasi Pedesaan yang dibebani ke Kementerian Desa. Mohon izin, kami menyampaikan Pak Hamka dan Pak Pimpinan, arah kebijakan DAK yang sudah kami laporkan tadi antara lain arah kebijakannya bagi meningkatkan konektivitas di daerah, membangun atau membuka aksesibilitas dan mendukung mobilitas penumpang maupun barang dari pusat-pusat pertumbuhan, pusat-pusat produksi ke pusat-pusat pemasaran, yang masih di daerah afirmasi, tujuannya mengatasi kesenjangan disparitas antar wilayah dan sarana meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat terutama di daerah-daerah afirmatif.

Nah, khusus itu kriterianya, izin Pak Hamka dan Pak Pimpinan, acuan yang dipakai dalam penentuan lokasi prioritas sebagaimana kami laporkan tadi pertama, dasar regulasinya pada PP 78/ 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Jadi, dasarnya adalah memang ini afirmasi untuk transportasi pedesaan tetapi di daerah tertinggal atau yang masih dalam

proses pembinaan meskipun sudah lepas, tapi proses pembinaan yang itu kurang dari tiga tahun, kalau sudah di atas itu maka dilepas program ini mengingat keterbatasan anggaran.

Kemudian, di samping PP 78, ada Perpres 63/ 2020 yang lanjut dari Perpres ini adalah lokasi prioritas di kawasan perbatasan berdasarkan rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Tahun 2020 dan 2024. Masuk juga kriteria berikut adalah 52, Pak Pimpinan, 52 kawasan transmigrasi prioritas pada RPJMN 2020-2024 serta afirmasi di tanah Papua, Papua Barat maupun di Papua sendiri, itu sesuai dengan Inpres Nomor 9/ 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dan, untuk 2023 ada 84 kabupaten daerah afirmasi di kawasan barat, maupun di kawasan timur dengan kriteria yaitu kapasitas fiskal dengan kategori sedang atau sangat rendah. Yang kedua, kriterianya indeks keterjangkauan dengan kategori yang rendah. *Nah*, adapun menu kegiatan yang diusulkan oleh daerah dan kemudian ini dikoordinasikan dengan Bappenas masuk ke jalan desa, kawasan, kemudian moda transportasi darat maupun perairan, jembatan gantung maupun ada dermaga atau tambatan-tambatan perahu.

Nah, ini prosesnya kami sudah lampirkan di Paparan kami siklusnya mulai dari perencanaan, pengusulan, sampai dengan kami memfasilitasi rapat-rapat koordinasi untuk memverifikasi usulan yang masuk dari daerah, tentu saja melibatkan baik Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran maupun dari Bappenas. Kira-kira itu, Pak Hamka dan Pak Pimpinan terkait dengan DAK.

F- P GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):

Izin sebentar, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Hamka.

F- P GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Yang ingin saya tahu persis ini Pak, fisik diajukan ini kan lokus juga. Tadi ada jalan desa, transportasi fisik yang diajukan oleh daerah itu dalam bidang transportasi apa Pak? Yang diajukan oleh daerah, moda darat, mobil angkutan? *Oh*, itu setelah itu dikelola oleh desa? Bumdes? Oke, makasih.

KETUA RAPAT:

Sudah, Pak? Ya, selanjutnya kami persilakan, Pak Irjen.

SEKJEN KEMENDES PD TT RI (TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si.):

Izin, Pak Pimpinan terkait yang terakhir, Pak Sudjadi.

KETUA RAPAT:

Oh, ya silakan-silakan.

SEKJEN KEMENDES PDTT RI (TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si.):

Izin. Siap.

Pak Sudjadi, mohon izin kami akan memperhatikan Pak Sudjadi atas usulan yang Bapak maksudkan, yang disampaikan terkait dengan penurunan atau pencegahan *stunting*. Mohon izin Pak, jadi terkait dengan program ini mengikuti aturan yang sudah kami pegang selama ini bahwa pencegahan atau penurunan angka *stunting* itu menyangkut dua hal itu bidang yang spesifik terkait dengan 1.000 hari pertama kehidupan dan yang sensitif itu tidak langsung. Jadi, program-program yang tidak langsung, desa wisata, dan seterusnya dan membuka akses ekonomi masyarakat juga bagian tidak langsung dari upaya untuk pencegahan *stunting*. Tapi, apapun kami akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh Pak Sudjadi tadi untuk kami kelola di Biro Perencanaan dan koordinasi secara teknis dengan unit-unit terkait di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Kami kira itu *highlight* dari tanggapan kami dan ada yang bisa kami sampaikan secara tertulis, segera kami sampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Terima kasih, Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih, Pak Sekjen. Selanjutnya kami persilakan ke Pak Irjen.

PLT. IRJEN KEMENDES PDTT RI (Ir. EKO SRI HARYANTO, M.M):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Bapak-Ibu yang kami hormati dan kami muliakan,

Terima kasih secara khusus tadi disampaikan oleh Pak Suryadi dan Pak Mesakh Mirin, terkait dengan pengawasan. Memang pengawasan itu menjadi sangat penting di dalam hal ini, karena saya setuju Pak, Bapak Pimpinan tadi juga sampaikan karena ini menjadi pagar *gitu ya*, menjadi pagar.

Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin sampaikan bahwa APIP pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi memang ada keterbatasan, sehingga perlu harus kolaborasi atau kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri *gitu ya*. Jadi, kalau di pusat memang, karena Kementerian Dalam Negeri membina untuk APIP-nya daerah, jadi kita secara berjenjang. Tetapi di dalam proses semua, semua aduan melalui Sipemandu itu adalah kita tindaklanjuti semua tanpa kecuali. Jadi, memang itu sudah menjadi komitmen kita, hanya saja memang jumlahnya sedikit, itu ya, jumlahnya sedikit.

Kalau tadi kita perhatikan, kalau khusus misalnya Papua itu cuma dua *gitu* lalu Banten satu dan sebagainya, memang ini adalah yang kita terima, yang kita terima. Tetapi, mungkin tidak hanya itu sebenarnya yang dimaksud bagaimana kita, saya setuju lagi tadi dengan Pak Suryadi tadi, bagaimana pola pembinaan kita. Kami juga beberapa pengaduan yang tidak bisa selesai misalnya kita adu-aduan, lalu kita bikin semacam tela'ahan, tela'ahan analisisnya lalu kita kerja sama dengan APIP daerah, lalu kita evaluasi. Jika, evaluasi itu belum selesai mendekati akhir tahun biasanya kita lalu diskusikan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk bagaimana fasilitasi terhadap ini. *Nah*, ini adalah fungsi pembinaannya. Jadi, kalau *nggak* selesai fungsi pembinaannya akan dijalankan.

Sebagai contoh misalnya untuk di beberapa daerah di Sumatera Utara yang waktu itu langsung kita datang dan itu fungsi pembinaan. *Nah*, fungsi-fungsi pembinaan inilah yang sebenarnya kita sekaligus juga memberikan sosialisasi dan advokasi hukum terhadap APIP yang ada di daerah bagaimana cara menyelesaikan. Memang ada beberapa kendala di dalam proses untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan tindak lanjutnya, dari daerah itu. Ada beberapa daerah yang sudah selesai, tapi tidak melaporkan kepada kita tapi ada juga yang, memang belum selesai beneran, *nah* ini juga kita lihat itu kita evaluasi oleh tim kita di Inspektorat V karena khusus untuk pengawasan, khusus pengawasan dana desa dan tadi terkait dengan apa investigasi khusus *gitu*. *Nah*, ini investigasi khususnya itu nanti diturunkan juga.

Jadi, terus terang Bapak-Ibu yang saya hormati, memang ini kami bisa menjalankan setelah aduan itu adalah di Jakarta, artinya diajukan kepada kami melalui Sipemandu, jadi sistem informasi pengaduan masyarakat yang terpadu, jadi kita sudah ada *link*-nya. Ada juga yang langsung kepada Pak Menteri atau kepada Dirjen, itu juga kita tindaklanjuti, jadi semua kegiatan semua aduan yang ke pusat, kita tindaklanjuti. Hanya saja memang kalau kita lihat prosentasenya sangat kecil, ini berarti membutuhkan sesuatu apa yang harus kita lakukan, apakah nanti kita akan melakukan beberapa daerah yang tadi diusulkan oleh Pak Mesakh Mirin tadi, kami mungkin akan lakukan secara khusus dengan melalui Rakor, ya, di daerah itu, mungkin beberapa daerah yang ada, yang punya potensi rawan untuk di Papua, itu misalnya begitu. Jadi, kami juga akan coba lakukan untuk bagaimana kita mendekatkan diri dan sekaligus tentang advokasi bagaimana cara pengaduan dan sebagainya.

Mungkin itu sementara yang dapat kami sampaikan, sesuai dengan apa yang ada di dalam proses atau tanggapan kita terhadap pengaduan dari masyarakat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Irjen. Selanjutnya, Ibu Ka Badan.

KEPALA BPSDM PMDTT KEMENDES PDTT RI (Prof. Dr. LUTHFIYAH NURLAELA, M.Pd.):

Baik terima kasih. Mohon izin, Pak Pimpinan.

Bapak-Ibu Anggota Komisi V,

Yang terkait dengan TPP supaya lebih proaktif, kami menjadi catatan kami, dan nanti akan kami kondisikan bersama Kepala Pusat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang secara langsung menangani TPP melalui Korprov dan juga Korkab dan itu akan menjadi perhatian kami masukkan dari Pak Fadholi dan juga Bapak Ketua.

Kemudian, yang terkait dengan pelatihan-pelatihan perlu diperbanyak termasuk pelatihan Bumdes dan pelatihan-pelatihan yang lain ini memang betul Pak Hamka dan masukkan juga dari Pak Suryadi tadi dan juga Bapak Ketua karena sebetulnya kalau dilihat dari wilayah kerjanya, Balai-Balai, Balai Besar maupun Balai ini kan, sangat-sangat luas, seperti Balai Jogja itu wilayahnya adalah DIY, kemudian Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Itu kalau hanya belasan pelatihan itu memang sangat-sangat, sangat kurang. Itu tidak hanya di Balai-Balai saja. Sebetulnya kami juga ada pusat-pusat yang salah satunya adalah pusat pelatihan pegawai dan ASN yang itu juga sangat-sangat minim, apa anggarannya untuk melakukan pelatihan-pelatihan bahkan untuk internal Kementerian Desa sendiri begitu. Jadi, memang ini yang kami sungguh prihatin dengan kondisi semacam ini Pak Hamka dan Bapak-Ibu yang kami hormati,

Dan, terkait dengan yang sudah, yang kondisi saat ini adalah sebagian karena anggaran di pelatihan-pelatihan atau di Balai Balai Besar dan Balai-Balai, itu terkena AA, sebagaimana juga kegiatan-kegiatan yang lain. *Nah*, yang kami sampaikan ada 13 pelatihan Bumdes itu adalah pelatihan yang saat ini sedang kami usulkan, karena ada rincian usulan buka blokir, jadi sementara itu ya, masih diblokir juga *gitu*, jadi itu-itu memang yang menjadi keprihatinan kami untuk teman-teman Balai Besar dan Balai yang terus, karena mereka punya penggerak swadaya masyarakat yang sebetulnya tugas-tugasnya itu tidak hanya pelatihan tapi juga ada penyuluhan dan juga pendampingan yang itu bahkan tidak ada anggarannya. *Nah*, ini yang kami sekarang sedang coba kaji dan mencoba untuk supaya kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat desa ini bisa lebih ada prioritas, itu yang sekarang kami sedang upayakan. Terima kasih untuk masukannya.

Pak Ketua, untuk rendahnya capaian realisasi program TPP yang tadi peningkatan kapasitas, karena program ini adalah program yang dibiayai oleh apa ini, PLN jadi Pinjaman Luar Negeri dengan World Bank dan saat ini pada tahap penelaahan sehingga setelah ada NOL *step* dari World Bank nanti maka kegiatan itu akan mencapai 15.800 orang tepatnya, jadi tidak hanya 15.000 dengan besar anggaran 52,5 M, jadi itu yang, yang memang saat ini masih kami menunggu dari NOL dari World Bank.

Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.

F- P GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak.

F- P GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Terima kasih jawabannya, Bu. Pak Dirjen juga dengan Inspektur ya ini terkait masalah Bumdes ini, Pak, saya berharap pelatihannya itu lebih bagus lagi atau lebih, lebih seluruhnya kalau bisa dijangkau juga menyangkut pengawasannya, Pak. Kita tahu sekarang itu Bumdes itu di seluruh Indonesia saya tidak tahu apa ada datanya sama Bapak atau Ibu, sudah seberapa besar dana yang sudah terinvestasi dalam Bumdes seluruh Indonesia. Kami tahu bahwa Bumdes itu, bukan hanya sumbangan atau bantuan dari kementerian tapi dana desa juga bisa digunakan untuk Bumdes, ini yang saya ingin titipkan ke Pak Inspektorat dan Pak Sekjen. Sudah seberapa besar seluruh Indonesia dana Bumdes itu yang bergulir di seluruh desa di Republik Indonesia ini, karena apa? Kalau itu bergerak secara baik untuk menggerakkan ekonomi otomatis pertumbuhan ekonomi kita dapatkan. *Nah*, oleh karena itu, saya juga belum tahu datanya itu sudah berapa besar *sih*.

Yang kedua, saya mendahulukan pengendaliannya, Pak Irjen dan Pak Sekjen, jangan sampai terjadi baru kita melakukan audit misalnya. Saya dahulukan bagaimana pengendalian *intern* di Kementerian, apakah bisa masuk di dalam pengawasan mengenai Bumdes, menurut saya bisa karena tupoksinya, apalagi ada uang negara, ada bantuan langsung dari Kementerian Desa. Ini jangan sampai nanti ke depan kita lihat bahwa jumlah Bumdes itu besar modalnya juga besar tetapi hasilnya tidak baik. Ini saya titipkan sekali lagi, apakah itu dari sektor pelatihan, tenaga-tenaga Bumdes, maupun dari sisi pengendalian *intern* yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa.

Saya kira itu, Pimpinan. Mudah-mudahan kalau datanya belum pada hari ini silakan berikutnya. Saya ingin tahu sekalian berapa besar *sih* jumlah modal kita atau modal yang sudah diinvestasikan dalam Bumdes seluruh Indonesia. Saya kira demikian.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Hamka. Ibu Ka Badan matiin dulu *mic*-nya Bu, nanti saya kirimin obat batuk ya, kasihan Ibu Ka Badan.

F- P. GOLKAR (ILHAM PANGESTU):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan.

F- P. GOLKAR (ILHAM PANGESTU):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pak Sekjen beserta jajaran dan pimpinan,

Kebetulan hari ini di tengah-tengah kita ada datang beberapa kepala desa dari Aceh Tengah untuk melihat rapat sekaligus ada kepala desa yang mendapatkan desa wisata, mengundang langsung Pak Sekjen untuk meresmikannya ini kepala desa di atas. Mohon kita tepuk tangan untuk kepala desa. Terima kasih, Pimpinan, itu saja. Semoga desa-desa yang ada di Aceh dapat perhatian khusus dari Pak Sekjen kebetulan mereka hadir di sini.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ilham. Mau tanya ini suaranya Pak Ilham berapa di desa sana? Harus di atas 50% itu, iya kan. Selanjutnya, Pak Ka Badan saya persilakan.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DESA PDTT KEMENDES PDTT RI (Dr. IVANOVICH AGUSTA, S.P., M.Si.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Bapak-Ibu yang terhormat,

Ada dua hal yang disampaikan untuk BPI, yang pertama dari Pak Ketua berkaitan dengan internet di desa. Kami setuju kami segera tindak lanjuti sebetulnya, Kementerian Desa mendapatkan akses dari Bakti Kominfo untuk desa-desa yang belum mendapatkan internet. Di data kami 3.000 Desa tidak ada sinyal sama sekali dan 8.000 Desa, sinyal 2G dan GSM, kami tindak lanjuti dengan segera.

Kemudian dari Pak Willem yang menyampaikan soal data di desa, pada dasarnya saat ini, desa memperoleh dan bisa menggunakan datanya sendiri, data terbaru 2022 adalah pada level desa data IDM yang bisa di-*download*

hanya oleh desa itu sendiri dan Pemda. Dan, yang kedua data SDGs Desa sebanyak 62.000 desa yang bisa di-*download* oleh desa itu sendiri. Kemudian, pada bulan November akan ada *dashboard* untuk masing-masing desa dan kabupaten yang bisa dilihat tentang potensi, olahan potensi dan masalah untuk masing-masing desa.

Kiranya itu Pak Ketua, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Ivanovic, kayak penyerang ini Pak, sayap kanan Rusia, pemain bolanya. Apa namanya, Pak Ka Badan itu juga ada beberapa desa Pak, yang Bapak sudah terkena program ini, program internet desa tapi kemudian beberapa kerusakan-kerusakan Jadi, selain daripada melaksanakan kegiatan itu *maintenance* nya, Pak. Jadi, jangan sampai cuman aktif satu bulan dua bulan terus rusak lagi sudah *nggak* dipakai lagi, itu catatan saja, Pak Ka Badan ya.

Baik Bapak-Ibu sekalian,

Demikian jawaban dari mitra kerja Komisi V DPR RI. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan yang menjadi kesepakatan nantinya. Saya persilakan Sekretariat untuk ditampilkan. Baik saya bacakan, Pak.

Draf kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekjen, Irjen, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Senin, 5 September 2022.

1. Komisi V DPR RI meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen), Inspektorat Jenderal (Irjen), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk meningkatkan capaian serapan APBN Tahun Anggaran 2022, sesuai saran dan masukkan Komisi V DPR RI di mana capaian per bulan Agustus 2022 sebagai berikut:
 - a. Unit organisasi Sekretariat Jenderal, realisasi keuangan sebesar 56,68%, realisasi fisik sebesar 58,12%.
 - b. Untuk Inspektorat Jenderal, realisasi keuangan sebesar 50,06%, realisasi fisik 50,59%.
 - c. Untuk BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, realisasi keuangan sebesar 53,86% untuk realisasi fisik sebesar 54,67%.
 - d. Untuk Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, realisasi keuangan sebesar 51,56%, realisasi fisik sebesar 53,09%.

2. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing unit organisasi Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.
 - a. Unit organisasi Sekretariat Jenderal Pagu Kebutuhan Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp229.500.000.000 dalam nota keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp225.000.000.000 dan dalam Penyesuaian Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp221.170.000.000, terdapat selisih antara Pagu Kebutuhan dan Penyesuaian Nota Keuangan sebesar Rp8.330.000.000.
 - b. Untuk Inspektorat Jenderal, Pagu Kebutuhan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp54.750.000.000, Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp51.750.000.000 dan dalam penyesuaian Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp49.674.000.000, terdapat selisih sebesar Rp5.076.000.000.
 - c. Unit organisasi BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pagu Kebutuhan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.860.891.224.000, berdasarkan nota keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.792.892.120.000 untuk penyesuaian Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.787.913.120.000, terdapat selisih antara Pagu Kebutuhan dan Nota Keuangan sebesar Rp72.978.104.000.
 - d. Untuk unit organisasi Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pagu Kebutuhan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp211.265.039.000, Nota Keuangan RAPBN Tahun 2023 sebesar Rp134.786.762.000. Penyesuaian Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp131.339.762.000 terdapat selisih sebesar Rp79.925.277.000.
3. Komisi V DPR RI bersama Sekjen, Irjen, BPSDM, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sepakat bahwa program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 diprioritaskan antara lain dari hasil kunjungan kerja dan masukkan serta usulan Komisi V DPR RI.

Bapak-Ibu sekalian Anggota Komisi V yang saya hormati,

Apakah kesimpulan dapat, kesimpulan tersebut bisa disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak-Ibu mitra Komisi V, Pak Sekjen, Pak Irjen? Ada yang mau ditambahkan, dikurangi? Setuju, Pak?

(RAPAT: SETUJU)

Baik Pimpinan Anggota Komisi V DPR RI dan para pejabat Eselon I Kementerian Desa, PDTT yang kami hormati,

Dengan telah disepakatinya beberapa kesimpulan dan keputusan tersebut maka rangkaian acara rapat dengar pendapat pada hari ini, telah kita selesaikan, kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan selama berlangsungnya rapat. Sebelum acara rapat ini ditutup, kami berikan kesempatan kepada Saudara Sekjen Kementerian Desa PDTT untuk menyampaikan sambutan penutup.

Saya persilakan, Pak Sekjen.

SEKJEN KEMENDES PDTT RI (TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si.):

Baik terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi V yang kami hormati dan kami muliakan,

Mewakili dari Inspektorat Jenderal dari Badan Pengembangan SDM dari Badan Pengembangan Informasi dan seluruh staf yang hadir pada kesempatan ini, menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota yang telah memberikan banyak masukan, pendalaman, serta gagasan pada program-program Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Kami akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan bisa ditindaklanjuti. Kemudian, kami ucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama RDP pada hari ini.

Sekian. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Sekjen.

Dengan sambutan akhir atau kata penutup dari Pak Sekjen tersebut, maka rapat dengar pendapat pada hari ini, kita tutup dengan ucapan terima kasih

Wabillahitaufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.30 WIB)

JAKARTA, 5 September 2022

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002